



BUKU REKOMENDASI



Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2016



Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2016

© Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI 2016

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) adalah alat kelengkapan DPR RI yang bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dengan parlemen-parlemen negara lain baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi regional/ internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen negara lain.

Lebih lanjut lihat www.dpr.go.id

Semua pertanyaan tentang hak dan izin, termasuk hak-hak tambahan sekaligus saran dan masukan dialamatkan ke:

Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional
Biro Kerja Sama Antar-Parlemen
Sekretariat Jenderal DPR RI Gedung Nusantara III Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270 Indonesia

Telepon : +62 21 5175835, +62 21 5715813

Faks : +62 21 5732132

Email : biro_ksap@dpr.go.id



BUKU REKOMENDASI



Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2016

Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2016

**TIM PENYUSUN BUKU REKOMENDASI PANJA
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(SDGS) 2016**

PENGARAH

Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si
Ketua BKSAP DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Endah Tjahjani Dwirini Retnoastuti

REDAKTUR

Sartomo SS., M.Si.

EDITOR

Warsiti Alfiah, S.IP, D.ESS

DESAIN

Miranti Widiani

PEMBUAT ARTIKEL

Lisbet S.IP, M.Si., Heriyono Adi Anggoro, Arief
Rahman Hakim, Sheila teta Carina,
Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si

SEKRETARIAT

Beni Hardiana, S.IP, Haryanti, S.AB., M.AP, Hery
Prasetyo, Sugiarto

BUKU REKOMENDASI PANITIA KERJA

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
2016

**Parlemen dan SDGs:
Memperkuat Tata Kelola**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Anggota PANJA SDGs 2016.....	5
BAB I : Rekomendasi.....	9
Pemerintah.....	10
DPR-RI.....	12
BAB II : SDGs di Tahun 2016.....	17
BAB III : Kegiatan PANJA di Tahun 2016.....	33
Dalam Negeri.....	34
Luar Negeri.....	37
BAB IV : Halaman Praktik Cerdas.....	45
BAB V : Usulan Program Kerja tahun 2017....	65

KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb,
Salam sejahtera untuk kita semua,*

Tahun 2016 adalah tahun pertama pascadeklarasi global tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tahun-tahun pertama pascadeklarasi adalah krusial dalam menentukan bagaimana SDGs berjalan. Tahun tersebut menjadi titik kritis dalam sukses tidaknya pelaksanaan SDGs. Untuk menjamin kesuksesan tersebut, perlu keterlibatan semua pihak agar kita dapat memiliki SDGs itu; dapat merasa memerlukan SDGs; dan, dapat bersama-sama melaksanakan SDGs. Itu sebabnya dalam Rekomendasi Panja 2015, kami menekankan perlunya keterlibatan semua pemangku kepentingan dengan membentuk mekanisme bersama dalam menjalankan SDGs.

Tahun 2016 merupakan tahun pembuktian apakah kita akan berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan SDGs, atau, menegaskan prinsip *no one left behind* dalam melaksanakan dan menerima dampak pembangunannya. UN ECOSOC *High Level Political Forum* 2016 pun menekankan tema serupa: *Ensuring that no one is left behind*.

Pemerintah telah berencana untuk menyiapkan landasan pelaksanaan SDGs melalui Peraturan Presiden (Perpres). Perpres ini juga akan menjadi dasar pembentukan Tim Koordinasi Nasional untuk SDGs. Rencana tersebut telah lama disampaikan, dan pada kesempatan kali ini, melalui Rekomendasi dan Buku Laporan Kegiatan Panja 2016, kami mendorong agar payung hukum tersebut segera terbentuk. Perpres menjadi landasan legal bagi seluruh elemen untuk bergerak bersama dalam melaksanakan SDGs di level nasional.

Pada tahun ini pula mekanisme *National Voluntary Reviews* (NVRs) di level HLPF telah dilakukan. Putaran pertama NVRs telah diikuti oleh 22 negara. Indonesia telah mengajukan diri untuk NVRs pada 2017. Atas NVRs tersebut kami berharap agar Pemerintah dan para pemangku kepentingan nasional untuk membangun mekanisme akuntabilitas yang memadai. Proses pelaporan di HLPF perlu melibatkan DPR melalui Panitia Kerja (Panja) SDGs. Ini penting sebagai upaya membangun kohesifitas dan keragaman perspektif dalam pelaporan NVRs di 2017 nanti.

Kendati pergerakan di level eksekutif masih berproses, bukan berarti pihak lainnya berpangku tangan. Sejalan dengan kewenangan kami, Panja SDGs menggali gagasan, ide, inovasi dan beragam kebijakan dari para pemangku kepentingan. Kami mengunjungi Banyuwangi, Bojonegoro, Norwegia hingga Wales (UK) untuk menyerap dan mengumpulkan inovasi-inovasi. Kesemuanya kami lakukan sebagai upaya membangun *innovation pool*, yang dapat bermanfaat bagi DPR dan Pemerintah dalam pengembangan kebijakan yang berbasis SDGs.

Selain itu, berkat dukungan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Panja SDGs terlibat dalam dinamika internasional terkait SDGs. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan konstitusional yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan, dan kini diperkuat dengan fungsi-fungsi lembaga representatif modern seperti diplomasi parlemen dan representasi, DPR memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal beragam aspek yang terkait dengan SDGs. Kami terjun ke berbagai forum internasional dan regional untuk berbagi wacana, diskusi dengan para pemangku kepentingan dan membangun kemitraan global untuk melancarkan jalannya SDGs ke depan.

Akhir kata, buku ini menjadi bagian akuntabilitas kami dalam pelaksanaan kinerja Panja SDGs tahun 2016. Buku ini juga menjadi catatan tertulis bagaimana rekomendasi-rekomendasi Panja SDGs selama ini (2015 dan 2016) dapat berperan dalam mendorong Pemerintah mendukung pencapaian Agenda 2030.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dr Nurhayati Ali Assegaf
Ketua Panja SDGs
BKSAP DPR RI

ANGGOTA PANJA SDGs 2016



ANGGOTA PANJA SDGs 2016

NO.	NAMA	NO. ANGG	FRAKSI	KOMISI	JABATAN
1.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF	A-432	PD	I	KETUA PANJA
2.	JULIARI P. BATUBARA	A-168	PDIP	VI	WK. KETUA PANJA
3.	H. ROFI MUNAWAR, LC	A-115	PKS	IV	WK. KETUA PANJA
4.	TANTOWI YAHYA	A-252	GOLKAR	I	WK. KETUA PANJA
5.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, MS	A-538	PPP	I	WK. KETUA PANJA
6.	DR. EVITA NURSANTY, M.SC	A-171	PDIP	I	ANGGOTA PANJA
7.	DRA. SARWO BUDI WIRYANTI S.	A-144	PDIP	X	ANGGOTA PANJA
8.	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos	A-229	PDIP	I	ANGGOTA PANJA
9.	CHARLES HONORIS	A-149	PDIP	I	ANGGOTA PANJA
10.	ZAENUDIN AMALI, SE	A-292	PG	I	ANGGOTA PANJA
11.	H. HASNURYADI SULAIMAN	A-306	PG	VI	ANGGOTA PANJA
12.	DR. CAPT. ANTON SIHOMBING	A-237	PG	V	ANGGOTA PANJA
13.	SITI HEDIATI SOEHARTO, SE	A-281	PG	IV	ANGGOTA PANJA
14.	DR. H. SAREH WIYONO M., SH., MH	A-371	GERINDRA	II	ANGGOTA PANJA

15.	RAHAYU SARASWATI DJOHADIKUSUMO	A-356	GERINDRA	VIII	ANGGOTA PANJA
16.	HERI GUNAWAN, SE	A-346	GERINDRA	XI	ANGGOTA PANJA
17.	H. ANDI IWAN DARMAWAN, S.Psi., M.Si., M.SC	A-390	GERINDRA	V	ANGGOTA PANJA
18.	H. SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos	A-407	DEMOKRAT	IV	ANGGOTA PANJA
19.	VENNA MELINDA, SE	A-433	DEMOKRAT	X	ANGGOTA PANJA
20.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, MT	A-481	PAN		ANGGOTA PANJA
21.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, SE, MM	A-501	PAN		ANGGOTA PANJA
22.	Ir. AHMAD HELMY FAIZAL ZAINI	A-78	PKB	X	ANGGOTA PANJA
23.	DRA. HJ. SITI MASRIFAH, MA	A-77	PKB	IX	ANGGOTA PANJA
24.	H. JAZULI JUWAINI, LC., MA	A-117	PKS	II	ANGGOTA PANJA
25.	HJ. NURHAYATI	A-521	PPP	V	ANGGOTA PANJA
26.	H. HAMDANI, S.IP	A-30	NASDEM	IV	ANGGOTA PANJA
27.	AMELIA ANGGRAINI	A-17	NASDEM	IX	ANGGOTA PANJA
28.	M. ARIEF SUDITOMO, SH., MA	A-550	HANURA	VII	ANGGOTA PANJA

BAB I **REKOMENDASI**

REKOMENDASI

UNTUK PEMERINTAH

1. **MEMPERCEPAT PENERBITAN PAYUNG HUKUM UNTUK PENGARUSUTAMAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs).** Pemerintah telah berkomitmen untuk mensukseskan pencapaian SDGs dengan rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres ini menjadi dasar sejumlah keputusan yang menunjang pencapaian SDGs termasuk Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan juga pembentukan Tim Koordinasi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun hingga Desember 2016, Perpres ini belum juga disahkan;
2. **PENGUATAN MEKANISME KETERLIBATAN DPR DALAM PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BAIK DARI PERENCANAAN (PETA JALAN NASIONAL), PELAKSANAAN HINGGA PROSES MONITORING.** Dalam setiap pembahasan program kerja dan legislasi antara Pemerintah dengan DPR, SDGs harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja masing-masing Komisi/Badan harus mengintegrasikan SDGs dalam usulan program pembangunan mereka. Pemerintah juga harus melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan SDGs ke DPR melalui Panja SDGs yang dibentuk oleh BKSAP.
3. **REVIEW NASIONAL UNTUK PROSES REVIEW BERKALA DI UN ECOSOC HIGH LEVEL POLITICAL FORUM (HLPF) HARUS DIBAHAS BERSAMA DPR TERUTAMA DENGAN PANJA SDGs.** *Review* nasional yang menjadi proses *review* berkala di HLPF (*National Voluntary Reviews/NVRs*) telah berlangsung. Pada tahun 2016, telah ada 22 negara yang mengajukan proses NVRs.¹ Indonesia telah berencana untuk mengajukan proses NVRs di HLPF pada 2017. Mekanisme nasional dalam proses *review* tersebut harus dilakukan secara inklusif termasuk dengan melibatkan DPR. Pemerintah juga perlu mempertegas institusi-institusi penanggung jawab pencapaian indikator-indikator yang ada dalam SDGs;
4. **PEMERINTAH, KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), MAUPUN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DAN ENTITAS-ENTITAS POLITIK HARUS MENJADIKAN ISU SDGs SEBAGAI BAGIAN DARI PERDEBATAN PUBLIK DAN POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM ATAUPUN PEMILIHAN KEPALA DAERAH, TERMASUK PADA PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA 2017.** Kesuksesan pencapaian SDGs memerlukan keteladanan dari para pemimpin baik di tingkat nasional maupun daerah. Negara harus mendorong lahirnya tokoh-tokoh yang dapat menjadi teladan SDGs (*leading*

¹ China, Colombia, Egypt, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Madagascar, Mexico, Montenegro, Morocco, Norway, Philippines, Republic of Korea, Samoa, Sierra Leone, Switzerland, Togo, Turkey, Uganda, Venezuela. Lebih lanjut lihat <https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/inputs>

by example). Salah satu mekanisme untuk mengetahui komitmen para pemimpin adalah dengan menguji wawasan dan proyeksi kebijakan mereka dalam pembangunan berkelanjutan. Debat publik Pemilu menjadi sarana yang tepat untuk hal tersebut. Terlebih pada 2017 mendatang, sebanyak 101 daerah (7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota) akan menggelar Pilkada serentak.

5. **MENGGUNAKAN BAHASA YANG JELAS DAN MUDAH DIPAHAMI. PENGUATAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN SOSIALISASI PERLU MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DAN BAHASA DAERAH.** Bahasa yang lebih mudah didengar dan tidak rumit dipahami dapat membantu pemahaman dan dukungan lebih luas dari publik.
6. **MENSTIMULASI INISIATIF LOKAL YANG DAPAT MENYUKSESKAN PELAKSANAAN SDGs.** Kesuksesan pencapaian SDGs di level nasional tidak lepas dari keberhasilan pencapaian indikator SDGs di level daerah. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu mendapatkan dukungan dalam menciptakan inisiatif lokal yang mendorong suksesnya pelaksanaan SDGs. Sejumlah daerah terekam memiliki catatan inovasi yang mendukung SDGs seperti Kabupaten Bojonegoro yang telah memiliki Gugus Tugas Pelaksana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (melalui SK Bupati), Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan—yang pada 1 Juni 2016 mendeklarasikan kesiapan melaksanakan SDGs (Deklarasi Pangkep), Kabupaten Banyuwangi yang memiliki program Sedekah Oksigen (melalui Perbup).
7. **MEMASTIKAN KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA-DANA BANTUAN ASING (ODA) DARI NEGARA DONOR MAUPUN LEMBAGA MULTILATERAL SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE.** Indonesia mendapatkan dukungan kemitraan global untuk pembangunan melalui beragam skema ODA dengan jumlah yang besar. Kendati demikian, efektivitas pelaksanaan ODA maupun angka pasti dari besaran ODA yang diterima Indonesia (meliputi besaran dan pendonor) seringkali tidak dapat diketahui dengan pasti. Padahal apabila input ODA dapat terukur, publik dan DPR dapat melakukan monitoring yang memadai dan menakar efektivitas pelaksanaan ODA yang ada. Pemerintah diharapkan untuk mengembangkan mekanisme yang mudah diakses oleh publik terkait ODA. Hal ini dapat dilakukan melalui inisiatif *Open Government Indonesia*. Selain itu, Pemerintah perlu untuk memaksimalkan peran perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dalam menggalang kemitraan global untuk pembangunan. Sejumlah negara donor memiliki sejumlah fokus pembangunan internasional masing-masing, apabila

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat memetakan dan mengeksplorasi secara tepat prioritas tersebut, maka, peluang kemitraan dari negara donor maupun organisasi multilateral akan sangat bermanfaat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di level nasional dengan memperhatikan prinsip penguatan kapasitas, transfer teknologi dan inklusivitas.

8. **MENINDAKLANJUTI KESEPAKATAN PARIS (*PARIS AGREEMENT*) PASCA-RATIFIKASI YANG DILAKUKAN INDONESIA UNTUK Mendukung SUKSESNYA Pencapaian GOAL 13 (*TAKE URGENT ACTION TO COMBAT CLIMATE CHANGE*).** Pascatratifikasi *Paris Agreement* melalui UU No 16/2016, Pemerintah perlu segera melakukan sejumlah langkah-langkah untuk mendukung pelaksanaan kesepakatan tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis termasuk dalam hal penurunan emisi melalui mitigasi dan adaptasi maupun konservasi hutan dan menambah kawasan hutan sebagai penyimpan dan penyerap karbon. Selain itu, Pemerintah juga diminta terus mengembangkan kebijakan lainnya yang dapat memperkuat daya dukung lingkungan dan juga dalam aspekantisipasi potensi bencana lingkungan seperti banjir maupun tanah longsor.

9. **MENINGKATKAN PERAN INDONESIA DALAM FORUM GLOBAL TERKAIT SDGs.** Perwujudan SDGs sebagai agenda pembangunan global pengganti MDGs tidak terlepas dari peran Indonesia dalam komunitas internasional. Indonesia memimpin bersama Liberia dan Inggris dalam *High Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda*. Indonesia juga tergabung dalam Troika dengan Tiongkok dan Kazakhstan mewakili Asia dalam UN *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals (SDGs)*. Peran tersebut harus berlanjut hingga setelah SDGs dideklarasikan. Indonesia harus dapat memainkan perannya secara pro-aktif dalam beragam forum global termasuk UN ECOSOC HLPF ataupun forum-forum multilateral lainnya untuk memperjuangkan kepentingan nasional di level global (*pro-active diplomacy*).

UNTUK DPR

1. **MEMPERKUAT PERAN PANJA DALAM MENDORONG PENGARUSUTAMAAN SDGs DAN ASESMEN SDGs AWARENESS DI DPR;** Sebagai isu baru, SDGs semestinya mendapatkan porsi perhatian secara komprehensif dari para pemangku kebijakan tidak hanya di level internasional tetapi juga di level nasional. Berkaca dari pengalaman MDGs, yang tidak setiap pejabat publik memahami secara menyeluruh terkait agenda pembangunan millennium, DPR perlu mengambil langkah untuk memperkuat pengarusutamaan SDGs di DPR. Hal ini dilakukan juga dengan memperkuat peran Panja SDGs dalam mengambil langkah-langkah strategis terkait SDGs termasuk di antaranya dengan menginisiasi upaya asesmen untuk melihat sejauh mana lembaga legislatif mengarusutamakan SDGs dalam beragam kebijakan sekaligus mendapatkan data *awareness* yang dimiliki DPR. DPR dapat menjadi pionir dalam hal ini sebagai bukti bahwa lembaga

legislatif sangat memperhatikan isu SDGs. Dengan data tersebut, DPR dapat memetakan langkah-langkah penunjang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan SDGs berikutnya.

- 2. Penguatan Daya Dukung DPR dalam Implementasi Paris Agreement dan Komitmen Indonesia dalam Intended Nationally Determined Contribution (INDC);** Dalam beberapa hal teknis, *Paris Agreement* membutuhkan dukungan DPR di bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan. Sebagai contoh dalam bidang anggaran, DPR dapat mendukung peningkatan dana transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kehutanan dan Lingkungan untuk merealisasikan pelaksanaan upaya konservasi hutan maupun penurunan emisi yang ada dalam *Paris Agreement*. DPR juga dapat mengusulkan legislasi yang mendukung sistem keuangan ramah lingkungan (*green tax*).
- 3. Memastikan di Komisi dan Badan Terkait bahwa SDGs harus ada dalam setiap rapat kerja dengan pemerintah.** Dalam perjalanan SDGs ke depan, tantangan dalam mencapai SDGs akan berada dalam aspek yang lebih detail dan teknis. Oleh karenanya, DPR melalui Komisi dan Badan dapat fokus secara terperinci dalam bidang-bidang yang dimiliki SDGs. Alat Kelengkapan DPR harus dapat memastikan bahwa indikator SDGs yang sejalan dengan kepentingan nasional terakomodasi dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan/program kerja masing-masing kementerian/ lembaga (mitra kerja komisi/badan).
- 4. Pentingnya memprioritaskan prolegnas yang terkait SDGs guna mendukung pemerintah mewujudkan visi pembangunan pemerintah (Nawa Cita).** Prioritas legislasi yang mendukung SDGs harus menjadi prioritas DPR ke depan. Sejumlah usulan legislasi yang disampaikan Panja pada tahun 2015, seperti: RUU Tabungan Perumahan Rakyat, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, RUU Penyandang Disabilitas telah disahkan menjadi UU. Kendati demikian, dari daftar panjang Program Legislasi Nasional (2015-2019) DPR perlu lebih fokus kepada RUU yang terkait langsung SDGs, terutama legislasi yang mendukung pencapaian visi pembangunan pemerintah (Nawa Cita) yang telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
- 5. Memastikan komitmen setiap anggota DPR RI dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai SDGs di daerah pemilihan masing-masing.** Melalui fungsi representasi, anggota DPR RI dapat menyebarluaskan informasi mengenai SDGs dan prioritas pembangunan berkelanjutan di daerah pemilihan tersebut. Dengan itu, anggota DPR dapat memperjuangkan kepentingan konstituen dalam pengambilan kebijakan di tingkat pusat dan juga menyelaraskan kepentingan konstituen dengan pencapaian SDGs di tingkat daerah. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan berkelanjutan. DPR harus memastikan bahwa upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai SDGs dilakukan

oleh masing-masing anggota DPR, khususnya pada masa reses. Anggota DPR juga dapat menjalin kemitraan dengan entitas-entitas lokal (LSM maupun Perguruan Tinggi) yang dapat mendukung upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang SDGs.

6. MEMPERKUAT KEMITRAAN GLOBAL DENGAN MENGINISIASI AGENDA-AGENDA MULTILATERAL YANG SEJALAN DENGAN SDGs, TERMASUK DENGAN PEMBENTUKAN *WORLD PARLIAMENTARY FORUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT*.

Memahami bahwa isu pembangunan berkelanjutan adalah bagian dari keniscayaan global, perlu kiranya DPR menggagas forum global yang memiliki fokus pada isu pembangunan berkelanjutan. Rencana *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* dapat menjadi penguat upaya kemitraan global tersebut. DPR juga dapat mengadakan forum diskusi level internasional dengan mengundang para pemangku kepentingan termasuk lembaga riset/think-tank dan civitas akademika agar dapat menghasilkan output yang komprehensif dan tepat guna dari pembelajaran negara-negara lainnya maupun dari masukan para ahli.

BAB II

SDGs di TAHUN 2016

SDGs di TAHUN 2016

NASIONAL

Indonesia berkomitmen akan terus menerapkan pertumbuhan yang berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan komitmen global bersama namun setiap negara mempunyai kondisi lokal masing-masing yang memerlukan solusi lokal. Presiden Joko Widodo mengharapkan kerja sama, tukar menukar informasi dan pengalaman untuk meraih SDGs. Indonesia mencatat bahwa implementasi agenda 2030 akan memerlukan dukungan sumber daya yang besar. Untuk itu, diperlukan sumber pendanaan yang inovatif dan kemitraan yang lebih luas dengan memberdayakan kalangan swasta dan masyarakat madani. Dalam mencapai target SDGs, pemerintah Indonesia melibatkan semua pihak, mulai dari masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha, termasuk filantropi, dengan memfokuskan pada kelompok rentan dan kaum difabel.

Sepanjang tahun 2016, sejumlah perkembangan dalam hal upaya nasional mencapai SDGs terjadi. Hal ini mulai dari adanya komitmen Pemerintah untuk menetapkan sebuah payung hukum yang jelas untuk mewujudkan SDGs hingga sejumlah komitmen-komitmen lainnya dari masyarakat sipil dan juga pemerintah daerah yang perlu mendapatkan tempatnya dalam sejarah perkembangan SDGs di Indonesia.

Pascapertemuan antara Presiden Jokowi dengan perwakilan masyarakat sipil pada Desember 2015 silam, komitmen untuk membangun sebuah mekanisme melalui panitia bersama menguat. Komitmen ini-lah yang kemudian menjadi dasar penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres sedianya akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan SDGs dengan membagi tugas dan wewenang masing-masing sektor, membentuk Tim Koordinasi Nasional untuk pelaksanaan SDGs, dan menjadi dasar pembentukan Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*road map*) serta Rencana Aksi Nasional dan Daerah SDGs.

Pada Agustus 2016, Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa draf Perpres telah berada pada tahap final.² Namun hingga November 2016, pembahasan Perpres itu sendiri masih dalam proses penggodokan.³

Bagi sejumlah kalangan, terutama masyarakat sipil, Perpres menjadi kunci bagi pelaksanaan SDGs di Indonesia karena memberi landasan jelas legal formal dalam mencapai SDGs. Bagi DPR, adanya kerangka legal yang memadai dapat mendorong daerah-daerah untuk dapat bergerak dalam mencapai SDGs. Pengalaman pencapaian MDGs, yang mengalami keterlambatan di level daerah menjadi pelajaran berharga mengenai adanya instrumen legal yang memadai. Perpres dapat dipandang sebagai

² Sambutan Kunci Menteri Bappenas saat menjadi pemateri dalam Workshop on Strengthening the Role of Parliamentarians in Ensuring the Effectiveness of Development Resources in Support of the Implementation of the SDGs yang digelar di DPR atas kerja sama DPR dengan GOPAC, ISDB dan UNDP, Agustus 2016.

³ Lihat <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161115204649-78-172879/pemerintah-siapkan-perpres-sdgs/>

acuan bagi daerah untuk kemudian bergerak. Upaya mencapai SDGs di daerah masih memiliki kendala dalam bergerak karena sebagian besar daerah kerap menunggu adanya instruksi ataupun landasan legal dari pemerintah pusat dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Untuk itu percepatan pengesahan Perpres agar Indonesia dapat segera bekerja menuju pencapaian SDGs perlu dilakukan dengan segera.

Kendati demikian proses pendukung lainnya di luar pembahasan Perpres tetap berlangsung. Proses penyusunan draf definisi operasional indikator SDGs dan pedoman teknis penyusunan Rencana Aksi Nasional/Daerah (RAN/D) juga telah dimulai.

Sekretariat SDGs Kementerian Bappenas bersama dengan Kementerian, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/CSO) telah melakukan diskusi tentang struktur, sistematika, mekanisme dan pengorganisasian penyusunan Pedoman Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs. Selain itu pembahasan final metadata indikator pilar ekonomi SDGs oleh tim teknis dengan pemangku kepentingan beserta filantropi telah dilakukan pada 7 Desember 2016. Penyusunan draft metadata melalui serangkaian kegiatan berupa studi literatur dan seri pertemuan. Saat ini, draft metadata SDGs sudah dalam tahap finalisasi sehingga diperlukan konsolidasi hasil draft metadata SDGs antar pemangku kepentingan, agar seluruh pemangku kepentingan yang terkait dapat terlibat dalam proses finalisasi dokumen metadata SDGs.

SDGs memang merupakan agenda global, tetapi dalam mencapainya Indonesia perlu mengambil langkah dan kebijakan lokal. Prioritas pembangunan yang sejalan dengan SDGs akan diselaraskan dengan visi pembangunan Nawacita dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). UNDP Indonesia telah menerbitkan paparan singkat mengenai titik singgung antara Nawa Cita, RPJMN dengan SDGs. Adapun daftar titik singgung tersebut sebagai berikut:

Nawa Cita	RPJMN	SDGs
<p>N1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.</p>	<p>Bab 6.1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif ■ Memperkuat sistem pertahanan ■ Memperkuat jatidiri sebagai negara maritim ■ Meningkatkan kualitas perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri ■ Melindungi hak dan 	<p>G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia.</p> <p>G10 Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara.</p> <p>G16 Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan bagi semua dan membangun pranata-pranata yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.</p> <p>G17 Memperkuat cara-cara penerapan dan mervitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.</p>

	<p>keselamatan pekerja migran</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional ■ Meminimalisasi dampak globalisasi ■ Membangun industri pertahanan nasional ■ Membangun polri yang profesional ■ Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan 	
<p>N2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.</p>	<p>Bab 6.2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik ■ Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan ■ Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan ■ Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) ■ Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik 	<p>G16 Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan bagi semua dan membangun pranata-pranata yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.</p>
<p>N3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.</p>	<p>Bab 6.3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Meletakkan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris 	<p>G1 Mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam segala bentuknya. G2 Mengakhiri kelaparan, meraih keamanan pangan, dan memperbaiki gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.</p> <p>G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memeratakan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur Indonesia ■ Menanggulangi kemiskinan 	<p>kesejahteraan bagi semua usia.</p> <p>G4 Memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. G5 Meraih persamaan gender dan memperkuat semua perempuan dewasa dan anak-anak.</p> <p>G6 Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang lestari bagi semua.</p> <p>G7 Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berlanjut, dan modern bagi semua.</p> <p>G8 Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, pekerjaan penuh, produktif, dan laik bagi semua.</p> <p>G9 Membangun infrastruktur yang berdaya-tahan, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berlanjut, serta mendorong inovasi.</p> <p>G10 Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara.</p> <p>G11 Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan.</p>
<p>N4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.</p>	<p>Bab 6.4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan ■ Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 	<p>G16 Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan bagi semua dan membangun pranata-pranata yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar ■ Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba ■ Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah ■ Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal 	
<p>N5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong <i>land reform</i> dan program kepemilikan tanah, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat.</p>	<p>Bab 6.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Membangun kependudukan dan keluarga berencana ■ Membangun pendidikan: Melaksanakan Program Indonesia Pintar ■ Membangun kesehatan: Melaksanakan Program Indonesia Sehat ■ Meningkatkan kesejahteraan rakyat marjinal: Melaksanakan Program Indonesia Kerja ■ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penghidupan yang berkelanjutan 	<p>G1 Mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam segala bentuknya.</p> <p>G2 Mengakhiri kelaparan, meraih keamanan pangan, dan memperbaiki gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.</p> <p>G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia.</p> <p>G4 Memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.</p> <p>G5 Meraih persamaan gender dan memperkuat semua perempuan dewasa dan anak-anak.</p> <p>G6 Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang lestari bagi semua.</p>
<p>N6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.</p>	<p>Bab 6.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan ■ Membangun transportasi umum masal perkotaan 	<p>G1 Mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam segala bentuknya.</p> <p>G2 Mengakhiri kelaparan, meraih keamanan pangan, dan memperbaiki gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Membangun perumahan dan kawasan permukiman ■ Meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur ■ Memperkuat investasi ■ Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan ■ Meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi ■ Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional ■ Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional ■ Meningkatkan daya saing tenaga kerja ■ Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016 	<p>G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia.</p> <p>G4 Memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.</p> <p>G5 Meraih persamaan gender dan memperkuat semua perempuan dewasa dan anak-anak.</p> <p>G6 Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang lestari bagi semua.</p> <p>G7 Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua.</p> <p>G8 Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, pekerjaan penuh, produktif, dan laik bagi semua.</p> <p>G9 Membangun infrastruktur yang berdaya-tahan, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.</p> <p>G10 Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara.</p>
<p>N7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.</p>	<p>Bab 6.7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatkan kedaulatan pangan ■ Membangun ketahanan air ■ Membangun kedaulatan energi 	<p>G1 Mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam segala bentuknya.</p> <p>G2 Mengakhiri kelaparan, meraih keamanan pangan, dan memperbaiki gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.</p> <p>G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia</p> <p>G4 Memastikan mutu</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana ■ Mengembangkan ekonomi maritim dan kelautan ■ Memperkuat sektor keuangan ■ Memperkuat kapasitas fiskal negara 	<p>pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.</p> <p>G8 Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, pekerjaan penuh, produktif, dan layak bagi semua.</p> <p>G9 Membangun infrastruktur yang berdaya-tahan, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berlanjut, serta mendorong inovasi.</p> <p>G12 Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.</p>
<p>N8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.</p>	<p>Bab 6.8. Melakukan revolusi karakter bangsa</p>	<p>G3 Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua usia.</p> <p>G4 Memastikan mutu pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.</p> <p>G11 Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan.</p>
<p>N9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.</p>	<p>Bab 6.9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia</p>	<p>G5 Meraih persamaan gender dan memperkuat semua perempuan dewasa dan anak-anak.</p> <p>G10 Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara.</p> <p>G16 Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses pada keadilan bagi semua dan membangun pranata-pranata yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.</p> <p>G17 Memperkuat cara-cara penerapan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.</p>

Sementara dalam sejumlah kesempatan seperti yang disampaikan oleh Wamenlu A.M. Fachir dalam Sidang Pleno Majelis Umum PBB, November 2016, Pemerintah menyampaikan sejumlah prioritas program pembangunan saat ini yakni untuk membangun daerah terpencil, infrastruktur dan tol laut.⁴

Membangun kemitraan

Sebagai perwujudan dan penekanan pentingnya mencapai SDGs bersama-sama, kemitraan antarpemangku kepentingan pun juga telah mulai dibangun pada 2016. Pemerintah pun menggandeng aktivis filantropi untuk berkomitmen melaksanakan SDGs dalam aktivitas masing-masing. Hal ini ditandai dengan penandatanganan **Deklarasi dukungan kemitraan SDGs Indonesia Platform** yang dilakukan pada September 2016 lalu di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Kontribusi filantropi sangat dibutuhkan karena keberhasilan SDGs akan bergantung pada kemitraan global yang inklusif, keterlibatan pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta serta cara-cara inovatif untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan teknis. Kerja sama dengan filantropi akan mendorong pemerintah untuk berpartisipasi lebih aktif dan formal sehingga pencapaian SDGs tidak sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah. Filantropi yang didorong bekerja sama dengan pemerintah tak hanya pribadi kaya atau mapan. Lembaga filantropi mempunyai sumber daya dan keahlian teknis yang unik dibandingkan dengan lembaga pemerintah dan swasta dengan kemampuan mengambil risiko yang lebih besar dan menciptakan proyek-proyek baru yang menunjukkan keberpihakan kepada isu masyarakat yang terpinggirkan.

Secara konkret pada saat penyelenggaraan Festival Filantropi Oktober 2016 lalu, sejumlah lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional, BPJS Ketenagakerjaan dan Perhimpunan Filantropi Indonesia menandatangani MoU sinergi kemitraan pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Ratifikasi *Paris Agreement*—aksi konkret untuk iklim

Salah satu aksi yang monumental dalam penegasan komitmen politik mendukung pencapaian SDGs serta komitmen internasional lainnya adalah dalam hal ratifikasi *Paris Agreement*. Perjanjian Paris sebagai hasil keluaran dari *Conference of the State Parties to the UN Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) ke-21 di Paris merupakan instrumen internasional yang berlaku dan mengikat seluruh negara pihak dalam mewujudkan upaya mempertahankan suhu global di bawah 2 derajat celsius. Langkah ratifikasi *Paris Agreement* melalui UU No 16/2016 merupakan perwujudan konkret aksi atas iklim (SDGs No 13).

Ratifikasi *Paris Agreement*, memberi Indonesia banyak manfaat antara lain penguatan terhadap komitmen nasional dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui iklim yang rendah emisi. Hal ini juga merupakan amanat UUD 1945 Pasal 28H bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

⁴ Lihat <http://www.kemlu.go.id/newyork-un/en/siaran-pers/Pages/Wamenlu-Fachir-Sampaikan-Kontribusi-Nyanta-Indonesia-bagi-Pencapaian-SDGs.aspx>

⁵ Lihat <http://sdgsindonesia.com/2016/10/07/mou-sinergi-kemitraan-pelaksanaan-sdgs-di-indonesia/>

Aksi ke depan

Pada tahun 2017, langkah cepat untuk segera menyelesaikan pekerjaan tertunda seperti pengesahan Perpres, hingga upaya untuk menyusun peta jalan nasional dan juga rencana aksi adalah keniscayaan. Hal ini juga berkaitan dengan perkembangan kemajuan yang dapat menjadi bahan diplomasi di arena internasional.

Terlebih pada 2017, Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan *National Voluntary Reviews* (NVRs), sebuah proses *review* yang dilakukan secara sukarela di level *High Level Political Forum* (HLPF) UN ECOSOC. Sebagai penegasan prinsip inklusivitas dan juga *no one left behind*, sekaligus pengakuan akan deklarasi *Transforming our World: the 2030 agenda for sustainable development* yang menegaskan peran signifikan seluruh pemangku kepentingan termasuk parlemen, DPR semestinya turut andil dalam proses penyusunan laporan nasional untuk HLPF. Pelibatan parlemen dalam hal ini DPR saat proses penyusunan NVRs sangat bermanfaat untuk membangun konsensus nasional tentang perkembangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus memperkuat upaya kemitraan yang digalang oleh Indonesia dalam rangka membangun *national ownership of SDGs*.

INTERNASIONAL

High Level Political Forum on Sustainable Development

Sebagai perwujudan *review* pelaksanaan SDGs, maka proses tersebut dilaksanakan sejak di level nasional hingga global. Pada level global, *High Level Political Forum on Sustainable Development* akan memainkan peran penting dalam memantau serangkaian tindak lanjut dan proses *review* dan secara koheren bekerjasama dengan Sidang Umum PBB, *Economic and Social Council*, dan organ serta forum relevan lainnya.⁶

Untuk tahun 2016, HLPF berkumpul mengambil tema *ensuring that no one is left behind*. Pada HLPF 2016, proses *review* melalui *National Voluntary Reviews* (NVRs) mulai dilakukan. Ada 22 negara yang telah mengikuti NVRs yaitu: *China, Colombia, Egypt, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Madagascar, Mexico, Montenegro, Morocco, Norway, Philippines, Republic of Korea, Samoa, Sierra Leone, Switzerland, Togo, Turkey, Uganda, dan Venezuela*.⁷ NVRs memiliki keuntungan sebagai forum bertukar pikiran dan praktik cerdas. Beberapa hal yang terangkum dalam NVRs HLPF tahun 2016 adalah hal terkait pelibatan pemangku kepentingan lainnya. Sejumlah negara seperti Kolombia, Mesir, Estonia, Finlandia, Georgia, Jerman, Madagaskar, Meksiko, Maroko dan Turki aktif dalam penyiapan kerangka institusional untuk SDGs. Di Estonia misalnya, memiliki *the Estonian Sustainable Development Commission*, sebuah badan penasihat beranggotakan organisasi masyarakat sipil yang dibentuk sejak 1996. Madagaskar membentuk *Committee for Guidance and Follow-up* (Komite pengarah dan tindak lanjut) dan *Technical Committee for Implementation of the SDGs* (Komite teknis untuk pelaksanaan SDGs) yang melibatkan

⁶ Lihat paragraf 82 Deklarasi *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*.
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

⁷ Lihat <https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/inputs>

perwakilan *multi-stakeholders*. Komite pengarah misalnya, terdiri dari wakil dari Kantor Perdana Menteri, Parlemen Madagaskar, 13 kementerian, badan-badan PBB dan Uni Afrika. Sementara di level komite teknik anggotanya terdiri dari wakil badan-badan PBB, departemen teknis, masyarakat sipil, swasta, universitas dan pusat-pusat penelitian.⁸

HLPF 2016 menghasilkan beragam dokumen, karena juga menyangkut berbagai forum dalam HLPF termasuk *Intergovernmental bodies and forums* lainnya. Namun yang menjadi hasil utama HLPF adalah Deklarasi Menteri dari Segmen Tingkat Tinggi dari sesi ECOSOC 2016 dengan tema *implementing the post-2015 development agenda: moving from commitments to results* dan dari *HLPF on sustainable development* dengan tema *ensuring that no one is left behind*. Deklarasi Menteri tersebut menegaskan komitmen bahwa tidak akan ada yang ditinggal dalam melaksanakan Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan 2030. 17 SDGs dan 169 targetnya harus dipenuhi oleh seluruh negara dan rakyat dan untuk seluruh segmen masyarakat.⁹

Seiring dengan proses di HLPF, PBB juga secara berkala mengeluarkan publikasi untuk memperkuat kebijakan berbasis keilmuan. Publikasi dengan tajuk *Global Sustainable Development Report* tersebut menyediakan instrumen berbasis data yang kuat untuk mendukung pembuat kebijakan dalam memajukan pemberantasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Laporan 2016 menakar mengenai siapa saja yang memiliki risiko tertinggal (*left behind*), hubungan infrastruktur, ketidaksetaraan dan ketahanan, perspektif ilmuwan terhadap teknologi dan SDGs hingga pentingnya institusi yang inklusif. Lebih lanjut mengenai laporan ini dapat dilihat pada link:

<https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport/2016>

HLPF memberikan kesempatan luas bagi negara-negara anggota PBB untuk bertukar pikiran dan pandangan dalam melaksanakan SDGs. Pada 2017, proses NVRs juga akan kembali dilakukan dan Indonesia terdaftar sebagai satu dari 40 negara yang mengajukan NVRs. Negara lainnya yakni *Afganistan, Argentina, Bangladesh, Belarus, Belgium, Belize, Botswana, Brazil, Chile, Costa Rica, Cyprus, Czech Republic, Denmark, El Salvador, Ethiopia, Guatemala, Honduras, India, Iran, Italia, Japan, Jordan, Kenya, Luxemburg, Malaysia, Maldives, Monaco, Nepal, Netherland, Panama, Peru, Portugal, Qatar, Slovenia, Sweden, Thailand, Uruguay, Zimbabwe dan Togo*.¹⁰

HLPF 2017 akan berlangsung pada Senin (10/7) – Rabu (19/7), dengan sebelumnya pertemuan antarmenteri selama tiga hari (Senin 17/7) – Rabu (19/7). Tema pada tahun 2017 adalah *Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World*. Dalam HLPF 2017 akan ada sejumlah tujuan yang menjadi review mendalam termasuk tujuan No 17, yakni:

Tujuan 1: mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk;

Tujuan 2: mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatnya nutrisi dan memajukan pertanian yang berkelanjutan;

Tujuan 3: Memastikan kehidupan yang sehat dan memajukan kesvejahteraan untuk semua dan segala umur;

Tujuan 5: Mencapai kesetaraan jender dan memberdayakan seluruh perempuan dan anak-anak;

⁸ Synthesis of Voluntary National Reviews 2016, Division for Sustainable Development Department of Economic and Social Affairs UN, Hal 24. Lebih lanjut lihat https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/126002016_VNR_Synthesis_Report.pdf

⁹ Lihat http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2016/1&Lang=E

¹⁰ "States Members of the United Nations and States Members of Specialized Agencies", <https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates>, diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

Tujuan 9: membangun infrastruktur yang tangguh, memajukan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan mengembangkan inovasi;
 Tujuan 14: Melestarikan dan secara berkelanjutan pemanfaatan lautan dan sumberdaya laut untuk pembangunan berkelanjutan.¹¹

UN World Data Forum

Berbicara mengenai SDGs tentu tidak lepas dari indikator maupun kriteria data yang akan digunakan. Terlebih SDGs berbicara mengenai variabel yang lebih luas daripada MDGs. Pembentukan *UN World Data Forum* merupakan hasil rekomendasi yang disampaikan oleh *the United Nations Secretary-General's Independent Expert and Advisory Group on Data Revolution for Sustainable Development* pada laporan yang berjudul "A World that Counts" pada November 2014. Berdasarkan rekomendasi tersebut, *the Statistical Commission* (Komisi Data) menyetujui bahwa *a United Nations World Data Forum on Sustainable Development Data (UN World Data Forum)* merupakan *platform* yang paling sesuai di UN untuk mengintensifkan kerja sama dengan berbagai kelompok profesional, seperti kelompok yang bergerak pada teknologi informasi, informasi geospasial, ilmuwan data, dan pengguna serta para pemangku kepentingan. *UN World Data Forum* pertama akan diselenggarakan untuk kali pertama di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 15-18 Januari 2017. Pertemuan ini akan menghasilkan *Cape Town Global Action Plan for Sustainable Development Data*.¹²

The SDGs Report

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon pada 2016 mengeluarkan laporan pertama PBB terkait gambaran pencapaian 17 tujuan dengan menggunakan data yang tersedia. Tujuan laporan untuk menyoroti kesenjangan dan tantangan yang paling signifikan. Data terakhir menunjukkan bahwa sekitar satu dari delapan orang hingga masih tinggal dalam kemiskinan ekstrem, sekitar 800 juta orang menderita kelaparan, hampir seperlima kelahiran anak di bawah usia lima tahun tidak tercatat, 1,1 juta orang tinggal tanpa listrik dan dua juta lainnya mengalami kekurangan air.¹³ Untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut dan data statistik terkait pencapaian SDGs 2016 dapat dilihat di: <http://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20Report%202016.pdf>

The World Humanitarian Summit

Tahun 2016 juga diwarnai dengan agenda konferensi tingkat tinggi (KTT) tentang kemanusiaan, *The World Humanitarian Summit* (WHS). WHS yang digelar di Istanbul, Turki, Mei 2016, menghasilkan *Commitments to Action* yang fokus pada lima tanggung jawab utama (*prevent and end conflict, respect rules of war, leave no one behind, working differently to end need, invest in humanities*) dan 24 usulan perubahan. Lima tanggung jawab utama (*core responsibilities*) tersebut diperdalam menjadi tujuh pertemuan (*political leadership to prevent and end conflicts, upholds the norms that safeguard humanity, leave no one behind: a commitment to address forced displacement, women and girls: catalyzing action to achieve gender equality, changing people's lives: from delivering aid to ending need, natural disasters*

¹¹ Lihat <https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf>

¹² UN World Data Forum*, <http://undataforum.org/WorldDataForum/about/> diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

¹³ <http://unstats.un.org/sdgs/report/2016/>

and climate change: managing risks and crises differently, financing: investing in humanity) dengan 32 komitmen inti.¹⁴

UN Summit for Refugees and Migrants

UN juga baru-baru ini menggelar *UN Summit for Refugee and Migrants* (19 September 2016) dengan tema utama *Addressing Large Movements of Refugees and Migrants*. Summit tersebut menghasilkan *New York Declaration* yang di antaranya berisi pengakuan adanya tanggung jawab bersama untuk mengelola pergerakan besar dari pengungsi dan migran dengan cara-cara yang berkemanusiaan, memerasakan, penuh kasih sayang dan berfokus pada manusia. Sejumlah komitmen juga disepakati dalam Deklarasi New York tersebut seperti adanya hak mengelola dan mengawasi perbatasan yang sejalan dengan kewajiban yang tersedia dalam hukum internasional, termasuk HAM internasional dan hukum pengungsi internasional. Lampiran I pada Deklarasi tersebut adalah seperangkat kerangka kerja untuk penanganan pengungsi secara komprehensif dan untuk mencapai *Global Compact on Refugees* pada 2018, sementara Lampiran II mengatur langkah untuk mencapai *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* pada 2018.¹⁵

The New Urban Agenda (Habitat III UN Conference on Housing and Sustainable Urban Development)

Deklarasi Menteri di HLPF menandai adanya sejumlah peristiwa negosiasi antarpemerintah yang dapat membentuk kebijakan global dalam beberapa isu seperti perumahan dalam *UN Conference on Housing and Sustainable Urban Development* (Habitat III). Deklarasi mengharapkan agar agenda baru dari Habitat III dapat selaras dengan SDGs. Habitat III mencatat sedikitnya 54,5% masyarakat kini tinggal di kawasan perkotaan. Konferensi Habitat III menyetujui *Agenda Perkotaan Baru (A New Urban Agenda)*, sebuah dokumen berorientasi aksi yang akan mengatur standar global atas pembangunan perkotaan berkelanjutan, menelaah kembali cara membangun, mengelola dan tinggi di kota-kota dengan bekerjasama bersama mitra yang berkomitmen, pemangku kepentingan terkait dan aktor perkotaan di setiap level perkotaan dan sektor swasta. Habitat III digelar di Quito, Ekuador, pada Oktober 2016 mengadopsi agenda tersebut.

Agenda Perkotaan Baru berkomitmen pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan untuk inklusi sosial dan pengakhiran kemiskinan. *Agenda Perkotaan Baru* akan membangun wilayah kota sejahtera berkelanjutan dan terbuka bagi semua. *Agenda Perkotaan Baru* akan mewujudkan pembangunan kota yang berketahanan dan berkelanjutan secara lingkungan.¹⁶

Paris Agreement mulai berlaku

Pada Bulan November, tepatnya tanggal 4 November 2016, Perjanjian Paris atau *Paris Agreement* mulai berlaku mengikat bagi negara anggotanya. Pasal 21 *Paris Agreement* menjelaskan bahwa instrumen tersebut akan berlaku pada hari ketiga belas dari tanggal sedikitnya 55 pihak dari konvensi dengan perkiraan 55 persen dari emisi gas rumah kaca telah menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan ataupun aksesi. Hingga

¹⁴ WHS Commitments to Action, https://www.worldhumanitariansummit.org/sites/default/files/media/WHS%20Commitment%20to%20Action_8September2016.pdf

¹⁵ New York Declaration, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.1

¹⁶ <https://www2.habitat3.org/bitcache/99d99fbd0824de50214e99f864459d8081a9be00?vid=591155&disposition=inline&op=view>

saat ini ada sekira 129 negara pihak dari *Paris Agreement*.

Paris Agreement merupakan komitmen pemimpin dunia untuk mempertahankan suhu pemanasan global di bawah dua derajat celsius, sebagai batas aman yang disampaikan oleh para ilmuwan dan untuk mengejar target lebih jauh di bawah 1,5 derajat celsius. Langkah pemotongan emisi karbon yang diajukan masing-masing negara berdasarkan *Paris Agreement* tidaklah mengikat secara hukum, tetapi kerangka kerja perjanjian tersebut yang mencakup mekanisme pengkajian secara periodik adalah mengikat. Target jangka panjang perjanjian adalah nol emisi (neto).¹⁷

The 4th Open Government Partnership Summit

Mengakhiri tahun 2016, *Open Government Partnership* menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Prancis pada 7-9 Desember 2016. OGP merupakan sebuah inisiatif internasional yang bertujuan mendorong prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, penguatan partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, bersih, efektif, dan efisien. KTT ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil guna sharing pengalaman dan inspirasi mengenai berbagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, responsif dan akuntabel.

Pada KTT ini, Indonesia mendapat 3 capaian utama, yakni: pertama, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi salah satu dari 15 daerah percontohan dunia seperti Paris (Perancis), Madrid (Spanyol), dan Seoul (Korea Selatan) untuk praktik pemerintah terbuka di tingkat pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terpilih karena komitmennya untuk melakukan transformasi keterbukaan sejak 2008 yang telah terbukti membantu mendorong angka pertumbuhan ekonomi Bojonegoro meningkat dua kali lipat dan penurunan angka kemiskinan serta pengangguran sebesar dua kali lipat pada 2015.

Kedua, dari unsur masyarakat sipil, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menorehkan capaian dengan terpilih sebagai juara II penerima *Open Government Awards* 2016 untuk inovasi 'API Pemilu'. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Perludem lewat inovasi API Pemilu dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan literasi pemilih dan pengawasan jalannya pemilihan umum.

Ketiga, Indonesia juga mendapatkan kepercayaan untuk memimpin diskusi panel terbatas terkait pentingnya prinsip *good and open governance* dalam mencapai tujuan dan target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's).¹⁸

¹⁷ Paris Climate Change Agreement Enters Into Force, <https://www.theguardian.com/environment/2016/nov/04/paris-climate-change-agreement-enters-into-force>

¹⁸ Micom, 'Indonesia dan Pemerintah Terbuka di OGP Global Summit 2016', <http://www.mediaindonesia.com/news/read/81971/indonesia-dan-pemerintah-terbuka-di-ogp-global-summit-2016/2016-12-09>

BAB III
KEGIATAN PANJA
DI TAHUN 2016



KEGIATAN PANJA

Sebagai alat kelengkapan yang dibentuk oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Panja SDGs melakukan beragam kegiatan untuk memantau, mengukur dan mengkaji kesiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia dan di berbagai daerah. Selain itu, anggota Panja SDGs dalam kapasitasnya sebagai anggota BKSAP berkiprah dalam beragam diskusi global terkait SDGs. Diskusi dan dialektika global tersebut sangat penting untuk pengayaan wacana DPR RI maupun dalam upaya membangun kemitraan global sejalan dengan kepentingan Indonesia.

DALAM NEGERI

Isu SDGs memiliki fokus-fokus spesifik yang berkaitan dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan salah satunya adalah pembangunan lingkungan. Panja SDGs menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan memang harus pula memerhatikan daya dukung lingkungan untuk menjamin kehidupan di Bumi berkelanjutan. Dalam upaya mendapatkan *awareness* terkait politik global berkonsep lingkungan, Panja SDGs beraudiensi dengan *President of the Council of Bureau Global Green Growth Institute (GGGI)*, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, pada Februari 2016.

Tim Panja SDGs beraudiensi dengan President of the Council of Bureau Global Green Growth Institute (GGGI), Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, pada Februari 2016.



Presiden GGGI yang juga mendapatkan gelar doktor *honoris causa* bidang pembangunan berkelanjutan tersebut memiliki relevansi erat dengan kerja-kerja Panja SDGs. Presiden GGGI menyambut baik Rekomendasi yang diterbitkan Panja 2015. Rekomendasi Panja SDGs tersebut telah relevan, tajam dan kontekstual. Pada kesempatan tersebut, Presiden GGGI yang juga Presiden Republik Indonesia ke-enam mengharapkan agar DPR serius mendorong ratifikasi *Paris Agreement* karena memiliki keterkaitan kuat dengan aksi perubahan iklim selanjutnya. SBY juga berharap agar rekomendasi Panja terkait dorongan kepada pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukkan unsur pembangunan berkelanjutan dalam debat politik pemilihan pemimpin baik di daerah maupun di level nasional dapat terwujud.

Pada kesempatan tersebut, Presiden GGGI tersebut menekankan peran penting Indonesia yang telah menjadi *champion global* dalam pembangunan berkelanjutan. Peran Indonesia juga signifikan dalam upaya memasukkan hal terkait pengelolaan kehutanan (*forestry management*) dalam *Copenhagen Accord* (hasil *Conference of the State Parties (COP)* ke-15, 2009). Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan bagian dari paru-paru dunia.

Sejak awal 2016, Panja SDGs bergerak dengan fokus memetakan potensi daerah maupun inovasi daerah dalam melaksanakan SDGs, sekalipun komitmen global tersebut masih berada dalam tahap awal. SDGs dalam beragam bahasanya memiliki irisan yang mendalam dengan tujuan UUD 1945 dan dengan demikian, tentunya, program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah melalui Nawa Cita memiliki keselarasan. Hal ini pula yang coba dilihat oleh Panja SDGs, di level daerah. Panja meyakini dengan beragam dinamika politik daerah, ada hal-hal yang menarik dalam konteks inovasi kebijakan pembangunan daerah, hingga komitmen dalam mencapai pelaksanaan SDGs



Ketua Panja SDGs BKSAP, Dr Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si dan Bupati Banyuwangi, Azwar Annas saat menerima Tim Panja SDGs BKSAP tanggal 1 Maret 2016

Untuk itu pada 2016, Panja SDGs mengunjungi dua daerah yakni Pemkab Banyuwangi dan juga Pemkab Bojonegoro. Pemkab Banyuwangi dibawah kepemimpinan Azwar Annas memiliki ragam inovasi yang menarik dalam mendukung pencapaian SDGs. Beberapa di antaranya adalah Sedekah Oksigen, Pembangunan bandara berkonsep hijau pertama di Indonesia, Konsep Pariwisata Berkelanjutan hingga Siswa Asuh Sebaya. Sementara Bojonegoro, di bawah kepemimpinan Suyoto, menjadi salah satu Kabupaten yang sangat inovatif dalam meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan melalui Program-program Penguatan Partisipasi Publik seperti Dialog Jumat. Bojonegoro juga menjadi daerah pertama yang mendeklarasikan kesiapannya melaksanakan SDGs dan juga menjadi salah satu daerah pelopor *Open Government Partnership (OGP)*. **Ragam inovasi dua daerah ini akan dipaparkan dalam Halaman Praktik Cerdas.**

Selain memetakan daerah, anggota Panja SDGs juga terlibat dalam sejumlah inisiatif dan kerja sama dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pencapaian-pencapaian tujuan tertentu dalam SDGs. Seperti kerja sama yang dilakukan Anggota Panja SDGs bersama dengan *International Non-Governmental Organization* (INGO), *Save the Children* Indonesia dalam Dialog Anak dan DPR RI: Mengakhiri Kekerasan Terhadap Anak yang digelar di Jakarta pada 21 Desember 2016. Dua anggota Panja SDGs, yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Fraksi Partai Gerindra) dan juga Arief Suditomo (Fraksi Partai Hanura) terlibat dalam dialog yang melibatkan 16 anak-anak dari rentang usia 10-17 tahun dari berbagai bentang wilayah Indonesia.



DIALOG ANAK DAN PANJA SDGs—(dari kiri ke kanan) 1. coretan anak-anak saat menyampaikan aspirasi dalam Dialog Anak dan DPR RI-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Anak yang digelar di Jakarta, 21 Desember 2016. 2. Anggota Panja SDGs, Arief Suditomo Fraksi Partai Hanura) dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Fraksi Partai Gerindra) berfoto bersama dengan sejumlah anak-anak peserta Dialog Anak dan DPR RI-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Anak yang digelar di Jakarta, 21 Desember 2016.

Kegiatan tersebut cukup aspiratif, mengingat dalam forum tersebut, anak-anak menyampaikan beberapa rekomendasi dan aspirasi kepada anggota DPR seperti: penyempurnaan dan penguatan upaya penegakan hukum dari UU Perlindungan Anak, pembentukan layanan satu pintu untuk penanganan kasus kekerasan, ruang anak untuk penyampaian aspirasi termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kebijakan.

LUAR NEGERI

The 24th Asia Pacific Parliamentary Forum, Kanada, Januari 2016

Panja SDGs berpartisipasi dalam dialektika anggota parlemen asia pasifik untuk sejumlah isu terkait Pembangunan Berkelanjutan pada *the 24th Asia Pacific Parliamentary Forum*, yang digelar di Vancouver, Kanada, Januari 2016. Ketua Panja yang juga Ketua BKSAP, Dr Nurhayati Ali Assegaf; Wakil Ketua BKSAP untuk masa 2014-2016, Teguh Juwarno; dan juga anggota BKSAP yang juga anggota Panja Irine Yusiana Roba Putri, turun gelanggang berkontribusi sebagai bagian Delegasi DPR RI pada forum tersebut. Sejumlah resolusi terkait SDGs terutama yang berkaitan dengan tujuan No 5 (pemberdayaan ekonomi, buruh migran terutama di sektor domestik, partisipasi perempuan di segala kehidupan), No 13 (tentang aksi perubahan iklim), No 14 (kehidupan di laut) hingga No 16 (penanganan kejahatan terorganisir lintasbatas, pemberantasan korupsi, terorisme, pencucian uang, penciptaan konflik dan stabilitas) maupun yang terkait tata kelola SDGs menjadi subyek pembahasan forum tersebut.

Selain itu, Ketua Panja SDGs juga menginisiasi pembentukan forum parlemen perempuan Asia Pasifik (*Meeting of the Women Parliamentarians of APPF*) untuk kali pertama. Atas perannya, Ketua Panja juga mendapatkan kehormatan untuk menjadi Ketua Bersama dalam forum baru tersebut. Forum ini, dalam proyeksinya menjadi komitmen bersama APPF untuk mewujudkan upaya peningkatan partisipasi politik perempuan di tiap kehidupan termasuk di level parlemen (Tujuan No 5).

4th Parliamentary Days OECD, Paris, Februari, 2016

Wakil Ketua BKSAP, yang juga anggota Panja SDGs, Rofi Munawar berpartisipasi dalam *4th Parliamentary Days OECD*, di Paris, pada Februari 2016. Topik-topik dalam agenda sehari tersebut memiliki titik fokus pada pencapaian tujuan No 7 dan 13 (energi murah dan terjangkau; dan aksi untuk perubahan iklim), No 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), No 16 (demokrasi dan juga anti-terorisme). Dalam kesempatan tersebut, Panja SDGs yang menggarisbawahi urgensi aksi untuk perubahan iklim menyerukan pentingnya seluruh negara untuk menaati Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) yang disepakati pada COP-21 di Prancis. Ia juga mendorong agar dunia global beralih ke energi yang ramah lingkungan.

Annual Parliamentary Hearing at the United Nations, New York, February 2016

Sebagai upaya membangun komunikasi, lobi dan dialog global dalam isu narkotika dan obat-obatan (Narkoba), anggota Panja SDGs, Venna Melinda menghadiri *Annual Parliamentary Hearing at the United Nations*, yang digelar Februari 2016 di New York. Topik dalam *Parliamentary Hearing* kali ini adalah ***The World Drug Problem: Taking Stock and Strengthening the Global Response***. Pada kesempatan tersebut, Venna Melinda menegaskan bahwa aspek keberlanjutan haruslah menjadi pedoman dalam upaya rehabilitasi dan perawatan. Dengan demikian, eks pecandu harus dipastikan terjamin integrasinya ke masyarakat dalam masa pascarehabilitasi. SDGs terdiri dari sasaran pembangunan berkelanjutan yang komprehensif dan berorientasi masyarakat. Agar dapat menghubungkan SDGs dengan upaya pencegahan dan perawatan narkoba, para anggota parlemen perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai SDGs. Salah satu caranya adalah dengan mendirikan sub-komite khusus untuk

mendukung kesuksesan SDGs. DPR telah mendirikan Panitia Kerja SDGs untuk memonitor dan mendukung implementasi SDGs di tingkat nasional. Panitia Kerja ini memiliki sejumlah mandat, termasuk memberikan rekomendasi mengenai kebijakan yang dibutuhkan terkait pencapaian SDGs. DPR juga mempromosikan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anggota parlemen mengenai SDGs. Keterlibatan anggota Parlemen sangatlah penting dalam upaya mempromosikan pencegahan dan perawatan penyalahgunaan narkoba.

The 3rd IPU Global Conference of Young Parliamentarians dan 134th IPU Assembly and Related Meetings, Zambia, Maret 2016

Anggota Panja SDGs melalui dukungan BKSAP berpartisipasi dalam agenda terjadwal dari *Inter-Parliamentary Union (IPU)* yang pada Maret 2016 mengambil fokus partisipasi pemuda. Mereka mengikuti dua agenda berurutan sekaligus yakni *The 3rd IPU Global Conference of Young Parliamentarians dan 134th IPU Assembly and Related Meetings* yang digelar di Lusaka, Zambia, Maret 2016. Adapun anggota Panja SDGs yang berpartisipasi adalah Wakil Ketua BKSAP, Rofi Munawar dan Syaifullah Tamliha, anggota Panja SDGs Charles Honoris, Sitif Masrifah dan Muhammad Syafrudin. Dalam konferensi global anggota parlemen muda, Charles Honoris ikut berpartisipasi dalam tema Agenda 2030: *Youth leading the way, leaving no one behind*. Konferensi global ini fokus membahas mengenai peran pemuda dalam berkontribusi terhadap agenda 2030 (SDGs). Dalam konferensi global tersebut sejumlah informasi berharga seperti adanya pembentukan komisi-komisi untuk pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Commission*), Komisi untuk masa depan berkelanjutan (*Commission on Sustainable Future*), maupun praktik cerdas dari negara-negara lain menjadi bekal berharga Panja SDGs dalam pendalaman inovasi global untuk mendukung SDGs.

Dalam IPU Conference, para anggota Panja terlibat dalam beragam agenda pertemuan komite-komite yang memiliki fokus-fokus dan agenda tematik terkait SDGs. Termasuk pula dalam pertemuan anggota parlemen muda, komisi demokrasi & HAM, komisi perdamaian dan keamanan internasional, komisi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dan lain sebagainya.

Global Parliamentary Conference of the Parliamentary Networks on the World Bank and IMF, Washington, April 2016

Dalam dialektika dengan badan keuangan dunia, Ketua Panja SDGs, Dr Nurhayati Ali Assegaf berkontribusi pada pertemuan *Global Parliamentary Conference of the Parliamentary Networks on the World Bank and IMF* dalam isu-isu pembangunan berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, Ketua Panja mendapatkan kehormatan untuk memoderasi diskusi antar-anggota parlemen untuk isu *Climate Change and Cleaner Energy Solutions*. Konferensi global tersebut mempertemukan sekitar 200 anggota parlemen dari 67 negara dan fokus pada isu-isu pekerjaan dan mata pencaharian, pertumbuhan ekonomi, iklim, layanan kesehatan, kesetaraan jender, dan perpajakan internasional. Konferensi global kali ini didesain untuk mendukung pelaksanaan SDGs dan Kesepakatan Paris. Dalam isu perubahan iklim yang dimoderasi oleh Ketua Panja SDGs, penekanan bahwa isu perubahan iklim perlu membahas pula peran perempuan dalam mitigasi dan adaptasi iklim. Selain itu, moderator juga menekankan bahwa perubahan menuju energi yang lebih bersih sejatinya dapat mendorong tidak hanya ekonomi yang lebih hijau tetapi penciptaan lapangan pekerjaan.

Women in Parliament (WIP) Global Summit, Yordania, Mei 2016

Dengan dukungan *Organization for Economic and Development Organization (OECD)*, *Women in Parliament Global Summit*, digelar di Yordania pada Mei, 2016. Anggota Panja SDGs, Sarwo Budi Wiryanti Soekamdhani dan Amelia Anggraini berpartisipasi dalam even tersebut. Agenda dialog, diskusi tentang perempuan tersebut berfokus pada pemenuhan kesetaraan perempuan dalam kekuasaan, peran perempuan dalam upaya perdamaian hingga kontribusi perempuan dalam menjawab tantangan migrasi dan integrasi yang ketiganya merupakan isu-isu terangkum dalam Tujuan No 16 (Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang kuat) dan No 10 (Mengurangi Ketidaksetaraan di dalam negara dan antarnegara). WIP menghasilkan deklarasi yang menegaskan pentingnya resolusi Dewan Keamanan 1325 tentang peran perempuan dalam perdamaian hingga mengapresiasi perkembangan partisipasi perempuan di level kekuasaan dan komitmen peningkatan perempuan dalam politik.¹⁹

IPU 1st Parliamentary Session during the 69th World Health Assembly, Jenewa, Mei 2016

Panja SDGs mengikuti fokus global dalam agenda kesehatan sejalan dengan SDGs. Untuk itu, anggota Panja yakni Siti Hediati Soeharto, Siti Masrifah dan Syofwatillah Mohzaib terbang ke Jenewa pada Mei 2016, untuk mengikuti *IPU 1st Parliamentary Session during the 69th World Health Assembly (WHA)*, sebuah sesi yang digelar kali pertama di sela-sela sidang dunia negara-negara anggota WHO. Topik utama kali ini adalah *Parliaments as a key actor in ensuring access to health for all*. Pada kesempatan tersebut, Indonesia menggarisbawahi peran penting parlemen dalam peningkatan sistem kesehatan melalui fungsi-fungsinya yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Delegasi juga memperkenalkan format Panja sebagai salah satu alat kelengkapan yang dapat dibentuk parlemen yang berfungsi secara spesifik fokus pada isu-isu SDGs.

Annual 2016 session of the Parliamentary Conference on the WTO, Jenewa, Juni 2016

Ketua Panja SDGs, Dr Nurhayati Ali Assegaf, Bersama dengan Wakil Ketua BKSAP yang juga anggota Panja SDGs dan Syaifullah Tamliha, berpartisipasi dalam *Annual 2016 session of the Parliamentary Conference on the WTO*. Ketua Panja mendapatkan kehormatan sebagai pembicara untuk menegaskan peran perempuan dalam perdagangan dalam topik *Trade as a vehicle of social progress: the Gender Perspective*. Dalam paparannya, Ketua Panja mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di WTO. Ia juga mendesak agar program kerja dan pendekatan yang diadopsi WTO perlu mempertimbangkan aspek gender karena tidak dipungkiri perdagangan internasional memberikan dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. WTO harus merangkul semua anggota dan pemangku kepentingan serta bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya dalam rangka gender-sensitize rules, negotiated agreements dan working culture WTO. Pada kesempatan lainnya, sebagai anggota Steering Committee PCWTO, Ketua Panja mendorong masuknya keterhubungan perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral dengan pelaksanaan agenda pembangunan internasional seperti SDGs sebagai salah satu paragraf hasil dari pertemuan tahunan PCWTO kali ini.²⁰

¹⁹ Lihat <http://www.womeninparliaments.org/wp-content/uploads/2015/12/Jordan-Summit-2016-Declaration-final-020816.pdf>

²⁰ Lihat <http://www.ipu.org/splz-e/trade16/outcome.pdf>

APA Standing Committee on Economic and Sustainable Development, Pakistan, Juli 2016

Tak hanya di level internasional, anggota Panja SDGs juga berdialog dan mengembangkan advokasi SDGs di level regional. Dua anggota Panja SDGs, Tjatur Saptu Edy dan Hamdhani pada Juli 2016 mengikuti pertemuan parlemen asia (*Asian Parliamentary Assembly*) komite Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Pakistan. Komite tersebut membahas isu-isu energi, lingkungan, kemiskinan dan SDGs secara spesifik. Khusus dalam hal resolusi SDGs, DPR RI telah menginisiasi isu SDGs di lingkup APA ketika menjadi tuan rumah pertemuan komite tersebut pada 2015. Kali ini, anggota Panja mendapatkan apresiasi khusus dalam resolusi APA tahun 2016 yang menyambut pembentukan Panja SDGs di Parlemen Indonesia dan dapat menjadi contoh cerdas bagi parlemen di negara-negara Asia lainnya.

8th AIPA Caucus, Laos, Agustus 2016

Dalam hal SDGs Tujuan No 8 (*Promote sustained inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all*), khususnya target 8.8 yakni melindungi hak buruh dan memajukan lingkungan yang aman untuk segala pekerja, termasuk buruh migran terutama migran wanita dan mereka yang berada di situasi kerja yang berbahaya (*Protect labor rights and promote safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those in precarious employment*), Panja SDGs juga mengikuti pertemuan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus* yang pada tahun 2016 fokus pada legislasi terkait buruh migran. Kaukus AIPA adalah pertemuan khusus dalam AIPA didedikasikan untuk pembahasan isu spesifik di level ASEAN. Selain itu, Kaukus AIPA juga berfungsi sebagai sarana review pelaksanaan resolusi AIPA. Pada Kaukus kali ini, anggota Panja SDGs, Siti Masrifah hadir dan ikut menyampaikan pencapaian-pencapaian Indonesia dalam perlindungan buruh migran termasuk ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

Global Green Growth Summit, Korsel, September 2016

Pada September 2016, Panja SDGs mendapat kehormatan diundang oleh *Global Green Growth Institute (GGGI)* untuk mengikuti *Summit* yang digelar di Korea Selatan. *GGGI Summit* kali ini fokus pada tema *Towards a Green Finance Action Agenda 2017*. Ketua Panja SDGs, Dr Nurhayati Ali Assegaf mengikuti agenda tersebut dan menyerukan pelibatan parlemen dalam kerja-kerja GGGI untuk mencapai SDGs. Terlebih, SDGs menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kesuksesan pencapaian agenda pembangunan global tersebut.



Ketua BKSAP, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si, bersama Delegasi DPRRI lainnya sedang mengikuti presentasi dari President of the Global Green Growth Institute (GGGI), Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, pada CGGI Summit pada tanggal 5-9 September 2016 di Jeju - Korea Selatan.

Parliamentary Session within the Framework of the Annual WTO Public Forum, Jenewa, September 2016

Ketua Panja SDGs, Dr Nurhayati Ali Assegaf berbicara dalam forum publik perdagangan dunia, *WTO Public Forum*, pada sesi parlemen dengan topik utama *how can global value chains make trade more inclusive? A legislative perspective*. Ia menekankan bahwa perdagangan adalah alat pengentasan kemiskinan. WTO mesti menjadi wahana anggota untuk bernegosiasi secara adil dan berkelanjutan. Tiap negara memerlukan ruang kebijakan untuk mengatur kebijakan masing-masing, namun, ia perlu saling melengkapi dengan kebijakan global. Memastikan inklusivitas, keberlanjutan pertumbuhan dan investasi yang tumbuh adalah penting. Parlemen berperan dalam sedikitnya tiga hal legislasi, anggaran dan pengawasan. Kebijakan yang adil dan menjaga ekonomi lokal juga perlu diperhatikan. WTO perlu berinteraksi secara konstruktif untuk membawa SMEs ke panggung dunia. Usaha Kecil Menengah (UKM) harus menjadi perhatian.

2nd Speaker's Consultation of MIKTA, Australia, Oktober 2016

Anggota Panja SDGs yang juga Wakil Ketua BKSAP DPR RI Syaifullah Tamliha dan Siti Hediati Soeharto mengambil peran diskusi dalam forum lima *rising countries* yang tergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia). Kali ini, di level parlemen, Australia menjadi tuan rumah dari pertemuan MIKTA kali kedua. Topik utama adalah terkait demokrasi, transparansi dan akuntabilitas di parlemen serta inisiatif *Open Government Partnership*. Hal-hal ini merupakan isu yang berada di wilayah SDGs No 16. Pertemuan tersebut menghasilkan rilis bersama tentang pentingnya upaya untuk mempromosikan demokrasi demi mewujudkan *good governance*. Pertemuan juga menggarisbawahi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya membentuk lembaga legislatif yang terbuka bagi masyarakat dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik.

OECD Global Parliamentary Network, Prancis, Oktober 2016

Anggota Panja SDGs, Dr Evita Nursanty berpartisipasi dalam *OECD Global Parliamentary Network*, di Prancis, Oktober 2016. Indonesia merupakan salah satu negara mitra OECD dan kerap aktif mengikuti kegiatan bersama *OECD Global Parliamentary Network* sejak tahun 2015. Dengan mempertimbangkan adanya peningkatan kerja sama antara OECD dan Indonesia, serta posisi Indonesia sebagai salah satu mitra kerja OECD, DPR RI menerima undangan pertemuan tersebut dan mengirimkan Delegasi untuk menghadiri acara tersebut. OECD kali ini membahas mengenai isu-isu digitalisasi, praktik bisnis yang bertanggung jawab (SDGs No 9: Industri, Inovasi, Infrastruktur), hingga migrasi dan integrasi (SDGs No 10: mengurangi ketidaksetaraan di dalam negara dan antarnegara).

135th IPU Assembly and Related Meetings, Jenewa, Oktober 2016

Panja SDGs berpartisipasi dalam beragam agenda pertemuan *Inter-Parliamentary Union (IPU)* ke-135 yang digelar di Jenewa, Oktober 2016. Panja SDGs diwakili oleh Ketua Panja Dr Nurhayati Ali Assegaf dan anggota Panja Rofi Munawar (Wakil Ketua BKSAP), Siti Hediati Soeharto, Dr. Evita Nursanty, Irine Yusiana Roba Putri, Tjatur Sapto Edy dan Arief Suditomo. Para anggota Panja berkontribusi dalam beragam agenda pertemuan IPU, termasuk dalam pembahasan draf resolusi tentang peran perempuan dalam politik di Komite Demokrasi dan HAM. Panja SDGs mengusulkan satu butir pasal tentang perlunya partai politik melakukan kegiatan rutin pemberdayaan perempuan. Selain itu, dalam isu kemanusiaan/humanitarian, Ketua Panja mengambil kontribusi dengan terpilih secara aklamasi sebagai *President of Coordinating Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law*. Komite ini akan bekerja dalam isu-isu kemanusiaan yang memiliki singgungan erat dengan SDGs.

Parliamentary Meeting on the Occasion of the UN Climate Change Conference (COP22), Maroko, November 2016

Dalam konteks pilar pembangunan lingkungan, Ketua Panja Dr Nurhayati Ali Assegaf dan Anggota Panja Sarwo Budi Wiryanti Soekamdhani berpartisipasi dalam sesi parlemen saat *Conference of the State Parties to the UN Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) ke-22 atau COP-22 di Maroko, November 2016. Sesi khusus bagi para anggota parlemen ini menjadi sarana *brainstorming* para anggota parlemen sekaligus memperkaya wawasan para legislator dalam politik global perubahan iklim. Secara spesifik topik-topik bahasan berkaitan dengan SDGs No 13 (Aksi untuk iklim) dan juga fokus pada apa yang perlu dilakukan pasca-ratifikasi Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*). Hasil dari sesi parlemen tersebut adalah para legislator dari seluruh dunia berkomitmen untuk prioritas sejumlah aksi seperti: mendorong pengkajian atas *Intended Nationally Determined Contributions* (INDCs) yang dilakukan oleh masing-masing negara secara sukarela dan memperkuatnya agar sejalan dengan target menahan pemanasan global di bawah dua derajat celcius, mobilisasi dana dengan mengusulkan mekanisme untuk memfasilitasi akses ke pembiayaan perubahan iklim dan memaksimalkan jumlah yang terkumpul, memperkuat adaptasi dengan memastikan upaya substansial dibuat dalam aktivitas adaptasi hingga mengembangkan rencana aksi teknologi dengan komponen utama adalah transfer teknologi yang telah dicoba dan digunakan, munculnya teknologi baru dan dukungan untuk inovasi melalui riset dan pengembangan.

Parliamentary Meeting at the 2nd High Level Meeting of the Global Partnership for Effective Development, Kenya, November 2016

Dalam pengembangan kemitraan global untuk tujuan-tujuan pembangunan (SDGs No 17), Wakil Ketua BKSAP yang juga anggota Panja SDGs, Rofi Munawar berkumpul bersama dengan legislator se-dunia dalam sesi khusus pada *2nd High Level Meeting of the Global Partnership for Effective Development*, di Kenya, November 2016. Aspek pembiayaan untuk pembangunan menjadi penting, karena dalam SDGs, prinsip inklusivitas dalam mobilisasi sumber daya pembangunan menjadi tumpuan utama kesuksesan agenda global ini. Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil adalah esensial untuk pencapaian SDGs. Hasil pertemuan tersebut menegaskan sejumlah komitmen legislator dunia, di antaranya dalam hal memajukan kemitraan pembangunan yang inklusif dengan peningkatan upaya untuk memastikan lingkungan pendukung untuk seluruh mitra, membangun kebijakan lingkungan yang memungkinkan sektor swasta menerapkan praktik bisnis yang bertanggungjawab, inklusif dan berkelanjutan.

Selain beragam kegiatan internasional yang melibatkan anggota Panja SDGs tersebut, dengan dukungan dari Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), pada 2016, Panja juga berkesempatan menjaring beragam praktik cerdas di sejumlah negara yakni Norwegia dan Wales, Inggris Raya. Norwegia menjadi salah satu tujuan mengingat komitmen mereka terhadap lingkungan yang sangat tinggi dan adanya kontrol ketat serta awareness tinggi dari Parlemen Norwegia (*Stortinget*) dalam mendukung SDGs sehingga memiliki mekanisme terkoordinasi atas kontrol SDGs. Sementara, Wales dan Inggris Raya menjadi fokus penjaringan praktik cerdas dengan bekal dari informasi singkat yang terungkap dalam *The 3rd IPU Global Conference of Young Parliamentarians* di Zambia, semester pertama tahun 2016, yang menerangkan adanya UU tentang Kesejahteraan Generasi Masa Depan (*Wellbeing of Future Generations Act*) yang disahkan Parlemen Wales pada tahun 2015 dan menjadi salah satu tonggak instrument di level global dalam penekanan agenda keberlanjutan (*sustainability*). Informasi lebih jauh mengenai inovasi-inovasi dari Norwegia maupun Wales, Inggris Raya yang dapat mendukung SDGs dapat dilihat dalam Halaman Praktik Cerdas.

²¹ Lebih lanjut <http://www.ipu.org/splz-e/nairobi16/outcome.pdf>

BAB IV
HALAMAN
PRAKTIK CERDAS



HALAMAN PRAKTIK CERDAS

BANYUWANGI—Membangun turisme berkelanjutan

Pemkab Banyuwangi merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki komitmen pembangunan berkelanjutan. Dalam aspek lingkungan, Perda No 13/2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi menekankan tentang pembangunan daerah pariwisata yang berkelanjutan. Perda juga memasukkan unsur perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.²²

Meninjau rumah dinas bupati banyuwangi



Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Banyuwangi, beberapa program sudah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Beberapa diantaranya adalah; KUB Samudera Bakti, Program Siswa Asuh Sebaya dan Program Sedekah Oksigen. Program KUB Samudera Bakti merupakan program restorasi dan pelestarian lingkungan hidup yang ada di Desa Basing. Didirikan pada tahun 2008, KUB Samudera Bakti dibentuk bersama-sama masyarakat untuk memulihkan ekosistem laut yang sebelumnya rusak dan mempengaruhi pendapatan hidup masyarakat sekitar. KUB Samudera Bakti bersama masyarakat Desa Basing bersepakat untuk membuat Zona Pemeliharaan Bersama yang diatur juga dalam Peraturan Desa Basing yang berguna untuk memulihkan ekosistem laut. Manfaat Zona Pemeliharaan Bersama ini sudah dirasakan manfaat oleh masyarakat selain kondisi ekosistem laut dipulihkan, kesejahteraan masyarakat juga meningkat dengan

²² http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_BANYUWANGI_13_2012.pdf



*Pertemuan dengan
Gubernur Jawa
Timur*

bertambahnya pendapatan dari sumber daya laut dan ikan. Kelompok Samudera Bakti telah secara kontinyu mengadakan pertemuan dan pembinaan bersama-sama Universitas, Lanal dan juga Pertamina kepada masyarakat dan nelayan untuk selalu melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup khususnya laut dengan program transplan karang yang murah dan mudah.

Selanjutnya, Program Siswa Asuh Sebaya merupakan program solidaritas antar siswa yang dikembangkan untuk membantu siswa-siswi yang tidak mampu dengan cara mengumpulkan dana oleh siswa yang berkecukupan. Program Beasiswa Asuh Sebaya memiliki misi untuk mendukung program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan struktural dan meningkatkan kepedulian tinggi kepada siswa yang membutuhkan. Dana yang dikumpulkan per-bulan digunakan untuk membantu siswa-siswi tidak mampu dalam kegiatan sekolah, pemenuhan alat kelengkapan sekolah dan juga pengembangan minat. Program Siswa Asuh Sebaya juga didukung oleh perangkat hukum UU Nomor 20 tahun 2003 dan juga Keputusan Bupati Banyuwangi no.188/182.

Lalu yang terakhir, Program Sedekah Oksigen adalah gerakan berbasis partisipasi warga untuk menanam trembesi dan hortikultura atau buah-buahan dengan komposisi trembesi sebesar 70% dan hortikultura atau buah-buahan sebesar 30% secara sukarela oleh masyarakat ataupun badan yang ada di Banyuwangi. Subjek yang terkena sedekah oksigen meliputi : (i) penerima bantuan hibah sebesar Rp.10.000.000, (ii) Badan, (iii) Lembaga pendidikan (iv) pegawai negara sipil yang mengajukan kenaikan pangkat (v) penggugat perceraian (vi) masyarakat. Program sedekah oksigen didukung oleh Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 tahun 2013.

Anggota Panja
SDGs melakukan
penanaman pohon
di pinggir pantai
Banyuwangi



BOJONEGORO—Terdepan membangun komitmen SDGs

Mengusung semboyan "Tidak ada kabupaten yang miskin, yang ada adalah daerah yang salah urus," Bojonegoro telah mengukuhkan semangat untuk mensukseskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di awal pelaksanaannya. Di bawah kepemimpinan Drs. Suyoto M.Si, Kabupaten Bojonegoro telah menuangkan tekad untuk melaksanakan SDGs melalui sebuah deklarasi pada tanggal 22 Maret 2016 yang lalu. Deklarasi tersebut memasukan enam pilar pembangunan berkelanjutan yakni pilar pembangunan ekonomi, pilar lingkungan hidup, pilar modal manusia dan modal sosial, pilar kebijakan fiskal berkelanjutan, pilar pemerintahan yang cerdas, baik dan bersih dan yang terakhir pilar kemimpinan transformatif.

Sebagai tindak lanjut dari deklarasi tersebut, Kabupaten Bojonegoro juga telah mempersiapkan perubahan secara birokratis yang strategis dan juga program-program yang mendukung. Salah satu langkah birokratis yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Bojonegoro adalah penyempurnaan Rencana Aksi Daerah SDG Kabupaten Bojonegoro bersama-sama dengan warga sekitar dan juga penyesuaian baseline RAD Kabupaten Bojonegoro, RPJMD Bojonegoro dengan perspektif Nawacita dan SDGs. Selain itu Kabupaten Bojonegoro saat ini juga merancang Sekretariat Tetap SDGs di Bappeda Bojonegoro.

Di dalam konsep awal Rencana Aksi Daerah, beberapa program pendukung program tujuan pembangunan berkelanjutan juga telah teridentifikasi. Sebagai salah satu contoh, prioritas pembangunan untuk menghapus kemiskinan akan dilakukan dengan beberapa program diantaranya adalah Gerakan Desa Sehat dan Cerdas dan juga peningkatan kualitas SDM melalui program beasiswa baik melalui program yang terkait BOS maupun DAK bagi siswa SMA



Penyerahan
cinderamata oleh
Bupati Bojonegoro

sederajat sebesar Rp.2.000.000,-/tahun. Selain itu program pengurangan angka kemiskinan juga dibantu oleh peningkatan perekonomian pedesaan yang memiliki tujuan peningkatan industry padat modal dan padat karya. Keseluruhan strategi di dalam konsep awal Rencana Aksi Daerah teridentifikasi melalui penggunaan open data.

Meningkatkan partisipasi publik

Bojonegoro juga merupakan daerah percontohan proyek *Open Government Partnership* (OGP) bersama-sama Seoul (Korea Selatan) dan Kota Tbilisi (Georgia). Kabupaten Bojonegoro memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung gerakan-gerakan keterbukaan pemerintah dan partisipasi publik. Sejauh ini, Kabupaten Bojonegoro telah mendukung inovasi pembangunan berbasis partisipasi publik dengan Peraturan Bupati yang selaras. Beberapa peraturan tersebut seperti Perbub 30/2013 mengenai Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik di Kabupaten Bojonegoro yang menggarisbawahi strategi-strategi seperti SMS centre, dialog publik yang dilakukan setiap hari Jumat ataupun surat pembaca untuk menerima aspirasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penentuan pelaksanaan program juga di perkuat oleh Perbub 12/2016 Mengenai Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja.

Selanjutnya pada tahun 2014, Kabupaten Bojonegoro juga mulai menggunakan sistem Informasi Teknologi (IT) sebagai salah satu langkah pengaduan masyarakat. Sistem pengaduan online seperti program LAPOR yang bekerja sama dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (sekarang Kantor Staf Presiden—*red*) juga didukung oleh kerangka hukum untuk pengelolaan pengaduan yang diperinci di dalam Perbup Nomor 42/2014 tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

*Kunjungan Kerja
Panja SDGs ke
Bojonegoro*



Daerah. Salah satu hal menarik yang dilakukan oleh Kabupaten Bojonegoro adalah kolaborasi Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah bersama ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mendata kelahiran, kematian dan perpindahan warga. Data tersebut dilaporkan secara rutin kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

*Pertemuan dengan
Bupati Bojonegoro
dan anggota DPRD*



NORWEGIA—Kontrol Parlemen kuat untuk SDGs

Secara keseluruhan, Norwegia merupakan penggerak awal secara politik untuk pembangunan berkelanjutan dan telah menginisiasi dan mengarusutamakan elemen-elemen pembangunan berkelanjutan di level legislatif maupun eksekutif. Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan (*National Strategy for Sustainable Development*) telah disetujui oleh pemerintah pertama kali pada tahun 2002 dan kemudian dituangkan ke dalam Rencana Aksi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Action Plan*) pada tahun 2004. Proses pembentukan NSDS tiap tahunnya mengikuti proses konsultasi yang luas dengan semua pemangku kepentingan terkait seperti Parlemen, LSM dan masyarakat adat (Parlemen Sami).

Setelah disahkannya *Sustainable Development Goals* pada bulan September 2015 yang lalu, diskursus mengenai pembangunan berkelanjutan di dalam Parlemen Norwegia (*Stortinget*) terus mendapatkan perhatian secara nasional. Salah satu hal yang pernah menjadi perdebatan di dalam parlemen adalah visi dan misi Norwegia untuk mendukung kebijakan pemberantasan kemiskinan di negara-negara miskin dan rentan yang ada di dunia sebagai prioritas utama keseluruhan dari Norwegia. Hal ini mendapatkan dukungan yang kuat oleh setiap konstituen yang di wakili oleh *Storting*.



Pertemuan delegasi Panja SDGs dengan Ketua Parlemen Norwegia

Selain itu, debat di dalam *Storting* bersama perdana menteri dan menteri lainnya juga didedikasikan kepada mekanisme dan tindak lanjut nasional dari SDGs untuk mencapai target pembangunan global. Perdebatan ini menghasilkan mekanisme koordinasi untuk pelaporan domestik mengenai SDGs yang diusung oleh Kementerian Luar Negeri sebagai *focal point* dari SDGs. Pada dasarnya, tanggung jawab untuk pelaporan dan pelaksanaan 17 goals dari SDGs diberikan kepada departemen yang terkait langsung dengan tujuan tersebut, namun untuk beberapa *goals* yang tumpang tindih kerja sama sektoral dari beberapa kementerian yang terkait dibutuhkan. Setiap kementerian wajib mengidentifikasi

beberapa kementerian yang terkait dibutuhkan. Setiap kementerian wajib mengidentifikasi daftar target yang dianggap menantang bagi Norwegia dan juga melaporkan status tindak lanjut dari masing-masing tujuan. Hasil dari laporan tersebut kemudian disalurkan kepada Kementerian Keuangan yang bertugas dalam menyimpulkan poin-poin utama pencapaian dan tantangan secara keseluruhan yang kemudian akan dituangkan ke dalam anggaran nasional Norwegia dan disampaikan kepada *Stortinget*. Kemudian Kementerian Luar Negeri memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan laporan secara keseluruhan dengan melibatkan para pemangku kepentingan lainnya seperti sektor bisnis, masyarakat sipil dan juga Sami Parlemen melalui konsultasi informal, sebelum proses tersebut diteruskan kepada High Level Political Forum di PBB. Melalui mekanisme yang telah disepakati tersebut, Norwegia telah berhasil menyampaikan national voluntary review yang pertama kepada HLPF pada tahun 2016 yang lalu.

Pertemuan dengan
Governor of Oslo



Komitmen untuk kemitraan global

Pada dasarnya, Norwegia menempatkan kerjasama internasional untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan memerangi kemiskinan secara global sebagai salah satu prioritas utama dari Strategi Nasional Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai salah satu negara yang berhasil menyumbangkan dana sebagai dana pembangunan, Norwegia juga banyak bekerja sama dengan negara lain dalam proyek-proyek yang berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan secara global seperti *REDD+* (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*) dan pembangunan *Blue Carbon Economy*. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan memiliki wewenang sebagai koordinator dan penyusun dari strategi pembangunan berkelanjutan secara lokal dan global dari Norwegia.

Visi dan misi Norwegia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang didasari oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat dan juga eksistensi Dana Abadi yang diperoleh dari pemasukan dana surplus produksi minyak dan gas. Didirikan pada tahun 1990, total dana abadi pemerintah Norwegia saat ini adalah dan memiliki total investasi di dalam

8.000 perusahaan yang tersebar di dalam 82 negara. Saat ini Dana Abadi Norwegia dikenal sebagai dana publik terbesar di dunia.

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan secara global, Dana abadi Norwegia sudah memasukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kerjanya dengan menerapkan indikator-indikator yang mendorong investasi yang etikal dan juga berkelanjutan. Sesuai dengan arahan dan Dewan Etika Independen yang ada di dalam Dana Abadi tersebut, dana tersebut tidak dapat diinvestasikan ke dalam perusahaan yang terlibat dalam penjualan senjata dan bahan militer ke Burma, perusahaan yang terlibat di dalam kerusakan lingkungan yang parah, perusahaan yang terlibat di dalam produksi tembakau dan juga perusahaan yang terlibat di dalam pelanggaran hak asasi manusia dan hak individu dalam situasi perang ataupun konflik.

Undang-undang mengenai informasi lingkungan (*Environmental Information Act*)

Tercatat sejak 2003, Norwegia telah mengesahkan undang-undang mengenai informasi lingkungan yang memfasilitasi perilaku sadar lingkungan. Undang-undang mengenai informasi lingkungan sendiri merupakan tindak lanjut dari Norwegia untuk menjalankan *Aarhus Convention* yang disepakati oleh negara-negara Eropa. Pada dasarnya tujuan dari konvensi dan undang-undang mengenai informasi lingkungan ada untuk memastikan akses informasi dan partisipasi masyarakat yang dapat membantu keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi perlindungan lingkungan di sekitarnya. Di dalam undang-undang ini, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan dari otoritas publik dan juga pihak swasta yang didirikan di Norwegia.

Sesuai dengan bab 2 dari undang-undang mengenai informasi lingkungan, informasi lingkungan yang wajib dipublikasikan adalah informasi analisis dampak lingkungan, kondisi kesehatan dan keselamatan manusia yang dapat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dan juga rencana program yang dapat memulihkan lingkungan tersebut. Undang-undang ini juga memperluas persyaratan kepada pihak swasta untuk membuka informasi dampak lingkungan di dalam proses produksi dan juga konten produk impor terhadap lingkungan.

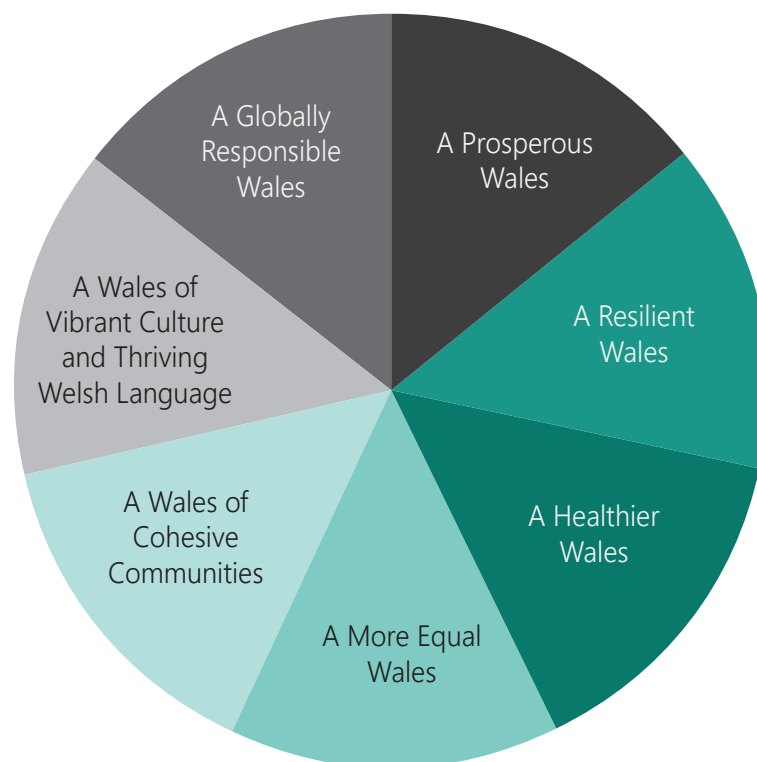


*Pertemuan dengan
Komisi Lingkungan
Parlemen
Norwegia*

Wales, Inggris Raya—keberlanjutan untuk generasi masa depan²³

Wales adalah contoh pemerintahan semi-otonom yang membuat praktik cerdas dengan menginisiasi *The Well-being of Future Generations Act* (WFG Act). Undang-Undang ini adalah contoh penting bagaimana pemerintah semi-otonom dapat mengadaptasi tujuan pembangunan berkelanjutan untuk aksi nasional. UU WFG adalah undang-undang pertama di dunia yang mengaitkan referensi langsung ke SDGs PBB.

Undang-Undang *The Well-being of Future Generations Act* adalah kerangka hukum visioner tentang pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2050. Selain itu, Undang-Undang *The Well-being of Future Generations Act Wales* menambahkan dimensi kebudayaan—selain sosial, ekonomi, dan lingkungan—dalam pencapaian kesejahteraan Wales ke depan. Apa yang dilakukan Wales menunjukkan betapa inisiatif lokal pembangunan berkelanjutan dapat melampaui apa yang dicita-citakan dalam SDGs



UU *the Well-being of Future Generation* 2015 tidak muncul tiba-tiba di Wales. Diskursus UU tentang pembangunan berkelanjutan telah mengemuka sejak tahun 1990-an. Jauh hari Pemerintah Wales telah menyiapkan peta jalan Pembangunan berkelanjutan. Untuk pertama kali pada tahun 1998 pemerintah Wales memperkenalkan *the Government of Wales Act* 1998 untuk memajukan *sustainable development* sebagai kerangka kerja pemerintah.

²³ Terkait UU WFG lebih lanjut lihat http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/pdfs/anaw_20150002_en.pdf

Penggalakkan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan terus dilanjutkan Pemerintah Wales melalui *the Government of Wales Act* (GOWA) 2006. GOWA 2006 bagian 60 memberikan tugas kepada pemerintah Wales untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pada 2009, Pemerintah Wales mengeluarkan *One Wales: One Planet* yang merupakan skema pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Pemerintah Wales. Buku ini berisi penegasan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan strategis yang menyeluruh dari semua kebijakan dan program lintas portofolio semua kementerian.



*Pertemuan dengan
Climate Change,
environmental and
rural affairs
committee,
Government of
Wales*

Pada tahun 2011, pemerintah Wales berkomitmen mengegolkan legislasi tentang pembangunan berkelanjutan yang nantinya akan menelurkan RUU *the Well-being of Future Generations* pada tahun 2014.

Undang-Undang *the Well-being of Future Generation* 2015 mulai berlaku pada 1 April 2016. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya Wales dengan menugaskan badan-badan publik untuk berpikir dengan lebih berkelanjutan dan berjangka panjang.

Proses penyusunan UU WFG menunjukkan proses inklusif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan di Wales seperti: pemerintah, parlemen, komunitas, dan rakyat. Saluran-saluran komunikasi dibuka oleh pemerintah Wales untuk menyerap aspirasi masyarakat luas dalam menyusun UU pembangunan berkelanjutan. Pada 2014, Menteri urusan Komunitas dan Penanggulangan Kemiskinan merilis saluran percakapan nasional yang diberi nama *The Wales*

We Want. Saluran komunikasi ini dibuka via kartu pos, internet, dan media sosial untuk menangkap aspirasi masyarakat secara komprehensif. Saluran *The Wales We Want* melibatkan 7000 orang yang mewakili komunitas dan kelompok di seluruh Wales.

Saluran komunikasi *The Wales We Want* pada akhirnya menjadi mekanisme penting dalam penyusunan UU *Well-being for Future Generation*. Selain itu, saluran komunikasi tersebut juga berkontribusi pada potensi debat politik, proses demokrasi, dan peningkatan kesadaran warga Wales akan tantangan Wales di masa depan.

Laporan *The Wales We Want* merumuskan 7 fondasi bagi embrio pembentukan pembangunan berkelanjutan:

1. Anak-anak perlu diberikan yang terbaik dalam tahun-tahun awal mereka;
2. Generasi masa depan perlu tumbuh-kembangnya komunitas yang dibangun di atas rasa kepemilikan yang kuat;
3. Tinggal dalam batas-batas lingkungan global, sangat penting untuk mengelola sumber daya secara efisien dan menghargai lingkungan;
4. Investasi dalam pengembangan ekonomi lokal Wales sangat penting untuk kesejahteraan generasi masa depan;
5. Kesejahteraan tergantung pada pengurangan ketimpangan dan menempatkan nilai yang lebih besar pada keanekaragaman;
6. Keterlibatan yang lebih besar dalam proses demokrasi, suara warga kuat dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan adalah fundamental bagi kesejahteraan generasi masa depan;
7. Merayakan keberhasilan, menghargai warisan, budaya dan bahasa Wales akan memperkuat identitas Wales untuk generasi masa depan.

UU *the Well-being for Future Generation* mendefinisikan apa itu "Pembangunan berkelanjutan," yang berarti proses peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya dengan mengambil tindakan, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan Wales. (Part 2 '*improving well-being*' section 2 '*sustainable development*').

Sebagai mandat UU, dibentuklah *Future Generations Commissioner for Wales* atau Komisioner untuk Generasi Masa Depan. Sebuah posisi jabatan publik yang terbilang tidak begitu umum di Indonesia. Komisioner *Future Generations* adalah orang yang memastikan badan-badan publik bekerja mencapai tujuan kesejahteraan Wales. *Future Generations Commissioner for Wales* dapat menyarankan badan publik Wales untuk bekerja lebih baik. Setiap tahun, *Future Generations Commissioner for Wales* akan melaporkan tentang bagaimana Wales mencapai tujuan kesejahteraan seperti tertuang dalam UU WFG 2015.

UU the WFG 2015 menetapkan *Future Generations Commissioner for Wales* berperan untuk bertindak sebagai wali bagi kepentingan generasi mendatang di Wales, dan untuk mendukung badan-badan publik yang terdaftar dalam UU untuk bekerja menuju pencapaian kesejahteraan. UU the WFG 2015 mensyaratkan bahwa agar kebijakan-kebijakan pemerintah berkelanjutan (sustainable), pengambilan keputusan harus melibatkan banyak pihak. Selain itu, perlu kemitraan dan kerja sama dari semua pihak dalam pencapaian tujuan kesejahteraan.

Proses adaptasi dari kerangka global ke dalam inisiatif lokal yang dilakukan Wales, membuka respon komunitas internasional sebagaimana Kofi Anan (2015) pernah berujar: "apa yang dilakukan Wales pada hari ini, akan dilakukan oleh dunia esok."

Inggris Raya dan *Official Development Assistance*

SDGs sebagai kerangka pembangunan global mempunyai dimensi lingkungan, ekonomi, dan politik. Namun demikian, banyak kalangan di UK menganggap SDGs sebagai kewajiban moral (*moral imperative*).²⁴ Ukuran pencapaian Pembangunan Berkelanjutan di mata Pemerintah UK tidak hanya berlaku di dalam negeri, akan tetapi juga di tingkat global. Mengingat prinsip di atas, implementasi pencapaian SDGs dimaknai sebagai upaya global pemerintah UK dalam memperjuangkan pendekatan pembangunan yang terbuka, modern, dan inovatif guna memecahkan tantangan global. Komitmen global pemerintah UK ini, sebagaimana dikatakan oleh *Secretary of State* Pembangunan Internasional DFID Priti Patel, dilandasi pemikiran bahwa bantuan internasional UK merupakan sebetulnya investasi keamanan dan kepentingan nasional masa depan UK.

UK menunjukkan komitmen awal dalam pembentukan SDGs, ketika Perdana Menteri—kala itu—David Cameron memegang posisi *Co-Chair High Level Panel of Eminent Persons* bentukkan Sekjen PBB pada Agenda Pembangunan Pasca-2015 medio 2012-2013. David Cameron—bersama Presiden Ellen Johnson Sirleaf dari Liberia dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Indonesia—diangkat oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon.

UK telah memainkan peran kunci dalam menciptakan seperangkat tujuan yang bersifat universal dan inklusif. Selama proses penyusunan SDGs, UK—melalui keterwakilan David Cameron—mengusulkan tiga tujuan (*goals*) untuk dimasukkan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk memastikan tidak seorang pun terlewatkan (*no one leave behind*): (1) kesetaraan gender (*gender equality*) dengan beberapa target untuk mencapainya seperti: penghentian pernikahan dini yang dipaksakan, penghentian mutilasi alat kelamin perempuan, serta perlindungan terhadap hak-hak seksual dan reproduksi perempuan. (2) UK juga mengusulkan tujuan perdamaian, keamanan, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai landasan masyarakat yang tangguh dan berhasil. (3) mengakhiri kemiskinan (*ending poverty*). Tujuan ini difokuskan pada upaya mengakhiri kemiskinan ekstrem selamanya, untuk semua orang, di mana pun, orang yang paling terpinggirkan dan rentan: apakah cacat, sulit dijangkau atau terkena dampak konflik.

UK adalah negara yang fokus pada upaya mobilisasi pendanaan untuk pencapaian SDGs. UK adalah negara donor yang telah melakukan realisasi bantuan ODA sebesar 0,7 persen dari total

²⁴ Hal ini misalnya dapat dilihat dari Pidato Gubernur Bank of England Mark Carney pada United Nations General Assembly, High-Level Thematic Debate on Achieving the Sustainable Development Goals, New York tanggal 21 April 2016. Lihat <http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/-speeches/2016/897.aspx>

GNI (Produk Nasional Bruto). UK adalah satu-satunya negara anggota G-7 yang memenuhi target PBB dengan memberikan sebesar 0,7 persen dari GNI untuk *Official Development Assistance* (ODA)²⁵ UK mencapai target 0,7 persen bantuan dari GNI pada tahun 2013.²⁶

Dalam proses selanjutnya, perkembangan politik di UK memunculkan wacana tentang pilihan apakah UK tetap bertahan (*remain*) atau hengkang (*leave*) dalam keanggotaan Uni Eropa. Pemerintahan Perdana Menteri David Cameron akhirnya mengadakan referendum pada 23 Juni 2016 yang dimenangkan kelompok yang "*Leave*" dengan angka suara 17.410.742 orang (51,9 %) berbanding kelompok "*Remain*" yang hanya dipilih 16.141.241 orang (48,1 %). Pascareferendum, UK mempunyai Perdana Menteri baru Theresa May.

Pascakeluarinya UK dari Uni Eropa, penurunan nilai mata uang poundsterling atau yang dikenal dengan istilah "*sterling downward*" menjadi tren yang mengkhawatirkan prospek pertumbuhan ekonomi UK. Perdebatan ekonomi yang meramalkan masa depan ekonomi UK menjadi menu perdebatan sehari-hari di UK ketika anggota Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mengadakan kunjungan teknis ke London pada 27 November-3 Desember 2016. Perkembangan ekonomi yang demikian menimbulkan sejumlah dampak terutama pada komitmen UK yang mengalokasikan 0,7 % dari Gross National Income (GNI) untuk program bantuan internasional (ODA).

Pertemuan dengan
Komite Audit
Parlemen Inggris
Raya



²⁵ Resolusi PBB 2626 (XXV), 24 Oktober 1970, paragraf 43.

²⁶ Target PBB terkait ODA dirilis pada tahun 1970. Dalam rentang waktu empat dekade hanya tujuh negara donor telah menjalankannya. Negara-negara seperti Norwegia, Denmark, dan Swedia telah menjalankan kebijakan ODA, sebagian besar melebihi 0,7 persen, sejak tahun 1975; Belanda melakukannya pada 2013 dan Luksemburg sejak tahun 2000. Finlandia mencapai target pada tahun 1991.

Theresa May menegaskan bahwa sebagai Perdana Menteri baru UK ia menjanjikan UK akan menjadi mitra global yang dapat diandalkan internasional terutama untuk mewujudkan nilai-nilai universal.

Dalam pidato pertamanya di Majelis Umum PBB pada 20 September 2016, Theresa May meneguhkan UK untuk: "terus menjunjung komitmen UK mengalokasikan 0,7% dari *Gross National Income* untuk pembangunan, melanjutkan pencapaian UK untuk mengurangi kemiskinan, menangani ketidakstabilan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh dunia. UK akan terus mendorong maju pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan."²⁷

Pidato Theresa May meneguhkan pandangan pemerintah UK yang melihat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai *moral imperative* (kewajiban moral) untuk membantu negara-negara berkembang dan negara-negara sedang berkembang untuk memenuhi tujuan, target, dan indikator yang tersua dalam SDGs. Pandangan seperti itu mempengaruhi kebijakan pemerintah UK tentang aspek pendanaan SDGs dengan segala target dan indikatornya.

Praktik cerdas dari implementasi SDGs yang dapat diambil dari UK adalah pembangunan internasional merupakan prioritas utama bagi pemerintah UK. Bahkan di masa ekonomi sulit, UK tetap berkomitmen untuk menjunjung komitmen dan memimpin dengan contoh, seperti yang digambarkan oleh volume ODA UK yang mencapai 0,7% dari pendapatan nasional bruto pada 2013. Hal ini menunjukkan bahwa kemauan politik yang gigih ditopang oleh konsensus antarpantai sehingga memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan SDGs yang ambisius.

Yang menarik, volume bantuan ODA yang mengharuskan pemerintah UK mengeluarkan dana 0,7% dari pendapatan nasional kini dibakukan melalui Undang-Undang. Cerita bermula pada 2015 ketika RUU yang diajukan oleh mantan anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal Michael Moore disahkan menjadi UU dengan dukungan dari pemerintahan koalisi. Pascapemberlakuan pada 1 Juni 2015, UU yang secara resmi dinamakan *International Development (Official Development Assistance Target) Act 2015* menempatkan target bantuan 0,7% dari GNI UK untuk bantuan internasional.²⁸ Dengan kata lain, target tersebut mengikat secara hukum (*legally binding*) bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan itu setiap tahun.

Dalam rentang waktu 2013-2015, pengeluaran total bantuan internasional UK berada di atau sekitar 0,7% dari pendapatan nasional. Pada 2015, sebuah data yang dirilis DFID menghitung 0,7% dari GNI UK menunjukkan bahwa Pemerintah UK menghabiskan GBP 12,1 miliar bantuan untuk kategori ODA.²⁹ Dana bantuan internasional UK tersebut paling banyak menysasar ke 55 persen negara-negara Afrika dan 41 persen negara-negara Asia.

Dari apa yang dipaparkan di atas, UK adalah negara yang menyatakan diri untuk terus berdiri sebagai pionir dalam kemitraan global dan pembangunan berkelanjutan. UK menerapkan pandangan keluar (*outward-looking*) dalam mengukur kesuksesan implementasi *Sustainable Development Goals*. Di dalam negeri, *Department for International Development* (DFID) adalah

²⁷ <https://www.gov.uk/government/speeches/theresa-mays-speech-to-the-un-general-assembly>

²⁸ http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/12/pdfs/ukpga_20150012_en.pdf

²⁹ https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/572063/statistics-on-international-development-2016a.pdf

penjuru (*focal-point*) pemerintah Inggris dalam pelaksanaan program bantuan pembangunan internasional.

UK dalam upaya pencapaian implementasi SDGs mengembangkan pola kemitraan baru dengan fokus memberikan bantuan internasional untuk negara-negara miskin, rentan konflik, dan rentan bencana. Strategi ini memperlihatkan pentingnya pembiayaan SDGs dilakukan oleh semua pemangku kepentingan. Dalam strategi kebijakan ODA pemerintah UK, semua pemangku kepentingan: pemerintah pusat, pemerintah lokal, NGO, lembaga riset, serta sektor swasta terlibat secara kolaboratif. *Official Development Assistance* diberikan dengan memperhatikan empat tujuan strategis:

1. Penguatan perdamaian, keamanan dan tata kelola global; pemerintah UK berkomitmen untuk berinvestasi lebih banyak untuk mengatasi penyebab ketidakstabilan, ketidakamanan dan konflik, dan untuk mengatasi kejahatan dan korupsi. Hal ini penting untuk pengurangan kemiskinan di luar negeri, dan juga akan memperkuat keamanan nasional UK.
2. Memperkuat ketahanan dan respon terhadap krisis; pemerintah UK berkomitmen menanggulangi krisis yang sedang berlangsung di Suriah dan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Prioritas juga akan diberikan pada pendanaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait kesehatan masyarakat global seperti resistensi antimikroba, dan mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (*climate change*).

Anggota Panja
SDGs bertemu
dengan First
Minister
Government of
Wales



UK menunjukkan komitmen global terhadap perubahan iklim (goal 13). Pada 2015 UK meningkatkan pendanaan iklim setidaknya 50% selama lima tahun (2016-2020), termasuk menghabiskan setidaknya GBP 1,76 miliar di 2020, naik menjadi setidaknya GBP 5,8 miliar selama lima tahun. Ini menunjukkan komitmen Inggris untuk membantu negara-negara berkembang menggunakan energi bersih dan membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, menjelang konferensi perubahan iklim penting Desember di Paris.

Indonesia memanfaatkan dana bantuan internasional UK untuk menanggulangi perubahan iklim. Pada 27 Januari 2016 ditandatangani *MoU on Development Cooperation to Support Climate Change* antara Bappenas dan UKCCU sebagai payung perjanjian kerja sama pembangunan dengan UKCCU periode 2015-2018.

3. Penguatan perdamaian, keamanan dan tata kelola global; pemerintah UK berkomitmen untuk berinvestasi lebih banyak untuk mengatasi penyebab ketidakstabilan, ketidakamanan dan konflik, dan untuk mengatasi kejahatan dan korupsi. Hal ini penting untuk pengurangan kemiskinan di luar negeri, dan juga akan memperkuat keamanan nasional UK.
4. Memperkuat ketahanan dan respon terhadap krisis; pemerintah UK berkomitmen menanggulangi krisis yang sedang berlangsung di Suriah dan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Prioritas juga akan diberikan pada pendanaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait kesehatan masyarakat global seperti resistensi antimikroba, dan mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (*climate change*).

Saat ini, DFID menegaskan tiga hal yang menjadi prioritas bagi bantuan pembangunan internasional. Ketiga hal tersebut adalah: pertanian, energi terbarukan, dan program untuk pemerintah mendistribusikan pendapatan yang merata. Menurut DFID, ketiga hal tersebut dapat dimanfaatkan negara-negara berkembang dan terbelakang.

Selain itu, Pemerintah UK mengeluarkan kebijakan nasional yang dinamakan Manifesto Komitmen Pemerintah UK 2015 (the Government's Commitment to International Development/ Manifesto 2015). Manifesto 2015 pemerintah UK beririsan dengan pencapaian implementasi SDGs lintas tujuan. Beberapa manifesto 2015 dapat dimanfaatkan negara-negara berkembang untuk mencapai kesuksesan implementasi SDGs, seperti:

- Menyelamatkan 1,4 juta nyawa anak-anak, dengan cara imunisasi 76 juta anak-anak dari penyakit mematikan;
- Bantuan sedikitnya untuk 11 juta anak di negara-negara miskin mendapatkan pendidikan yang layak, dan mempromosikan pendidikan bagi anak perempuan;
- Meningkatkan gizi selama setidaknya 50 juta orang, yang dinyatakan kelaparan;
- Bantuan setidaknya bagi 60 juta orang mendapatkan akses ke air bersih dan sanitasi, untuk menghentikan penyakit yang mematikan;
- Bekerja untuk pencegahan kematian ibu dan anak;
- Bekerja untuk mencapai akses ke keluarga berencana bagi semua orang
- Berupaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Bantuan pembangunan resmi (ODA) dapat dilihat sebagai pembiayaan (*financing*) yang dibutuhkan untuk mencapai SDGs, terutama untuk negara-negara berkembang (LDCs). Skema yang ditawarkan ODA meliputi penciptaan lapangan kerja, memberikan pelayanan, meningkatkan ketahanan dan meningkatkan pendapatan. ODA memiliki dampak positif pada pencapaian SDGs. UK mengambil peran utama dalam Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

BAB V

USULAN PROGRAM

KERJA TAHUN 2017



USULAN PROGRAM KERJA TAHUN 2017

1. *Survey Awareness* DPR;
2. Kunjungan ke redaksi media massa nasional dalam upaya diseminasi peran Panja dan sosialisasi hasil rekomendasi Panja 2016.
3. *Focus Group Discussion* (FGD) tentang peran para pemangku kepentingan dalam SDGs bersama dengan sektor swasta, organisasi multilateral, pemerintah, akademisi.
4. Pembahasan bersama penyusunan *National Voluntary Reviews* (NVRs) dengan pemerintah. Catatan: pada Juli 2017, Indonesia mengajukan diri untuk proses NVRs dalam UN Ecosoc HLPF.³⁰
5. Meningkatkan kemitraan **lokal** dengan mengunjungi para pemangku kepentingan di luar pemerintah seperti *civitas akademika*, sektor swasta, organisasi multilateral, lembaga swadaya masyarakat (LSM) ataupun lembaga pemikir (*think-tank organization*). Catatan: Sejumlah Perguruan Tinggi telah mengembangkan inisiatif untuk fokus dalam isu SDGs, seperti: (1) UNPAD, **Bandung** yang memiliki Pusat SDGs, (2) Universitas Gadjah Mada, **Yogyakarta** yang memutuskan menjadi universitas desa dengan pengabdian ke masyarakat sebagai titik sentralnya, (3) UNIKA Soegijapranata, **Semarang** yang mengembangkan inovasi untuk *sustainable city* dan model UMKM, (4) UNHAS, **Makasar** yang berfokus pada tujuan terkait maritim melalui *centre of excellent: Small Island Growth, Resilience, and Sustainability* (SIGRAS), (5) UNS, **Surakarta** yang akan membangun Pusat Studi SDGs dengan pengembangan Jaringan SDGs UNS bersama PTS sekitarnya.³¹ Sementara kemitraan dengan sektor swasta dapat dijalin dengan perkumpulan bisnis, seperti: Kamar Dagang dan Industri serta *Global Compact Network*. Kemitraan dengan Organisasi Multilateral/LSM/Think-tank organizations pun dapat dijalin dengan *United Nation Development Programme* (UNDP) Indonesia dan *United Nation Environment Programme* (UNEP) Indonesia, UNESCAP, CIFOR (Bogor), dan lain sebagainya.
6. Selain itu, Panja juga berkomitmen untuk terus menyerap beragam praktik cerdas dan inovasi dari berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya meningkatkan *awareness* terkait program-program pembangunan yang sejalan dengan SDGs. Adapun usulan daerah yang dapat dieksplorasi di antaranya:
 - **Kabupaten Kulon Progo**, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah seluas 586,3 km² dengan demografi penduduk sekitar 412.198 (data 2015). Kabupaten ini memiliki 12 kecamatan dan 88 desa. Di bawah kepemimpinan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, daerah ini mengalami perkembangan inovasi yang luar biasa. Bupati Hasto memiliki program Bela dan Beli Kulon Progo

³⁰ <https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf>

³¹ Sekar Panuluh & Meila Riskia Fitri, Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, Briefing Paper 02 (September 2015-September 2016), Infid, Hal 16.

dengan sejumlah inisiatif di antaranya dengan mengembangkan air minum dalam kemasan (AMDK) lokal dengan merk *Airku*. Merk lokal yang diproduksi perusahaan lokal tersebut saat ini telah mempekerjakan 12 karyawan tetap dengan tiap bulan memproduksi 2 juta air mineral kemasan gelas, 800 kotak kemasan botol 600ml dan 8.000 ukuran galon dan telah mengambil sepersepuluh pasar air mineral merek ternama di daerah tersebut. Bupati Kulon Progo juga memiliki program agar daerah tersebut tidak ada toko waralaba nasional. Yang ada, Bupati menggalakkan program Toko Milik Rakyat (Tomira) yang mengakuisisi Alfamart dan Indomart dan berhasil memasukkan produk lokal ke Tomira tersebut. Bupati Hasto juga dinobatkan sebagai empat kepala daerah terbaik versi *Majalah Tempo* tahun 2017 (edisi 31 Januari 2017).

- **Kabupaten Bantaeng dan Kota Makasar**, Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng di bawah kepemimpinan Bupati Nurdin Abdullah mengalami perkembangan pesat. Program-program pelayanan publiknya sangat inovatif dengan menghadirkan layanan jemput bola seperti Brigade Siaga Bantaeng (layanan dokter ke rumah-rumah) hingga inovasi lainnya seperti pengembangan bibit unggul pertanian, pemanfaatan limbah pangan untuk pakan ternak. Program tersebut sangat inovatif untuk Bantaeng yang sebelumnya termasuk 199 daerah tertinggal di Indonesia pada 2008an menjadi daerah termaju di Sulawesi Selatan. Kota Makasar membangun *Smart City* melalui pengembangan aplikasi-aplikasi termasuk mengembangkan aplikasi *Dottorot'ta* (aplikasi pelayanan dokter hingga ke rumah-rumah) yang menjadi salah satu TOP 35 inovasi pelayanan publik 2016 yang digagas Kemenpan, selain itu truk sampah dilengkapi GPS. Walikota Makasar, Ramdhan Pomanto membangun kesadaran masyarakat akan sampah dengan memberi insentif melalui Bank Sampah. Walikota Makasar, Ramdhan Pomanto dinobatkan sebagai empat kepala daerah terbaik versi *Majalah Tempo* tahun 2017 (edisi 31 Januari 2017).

7. Meningkatkan kemitraan global dengan menginisiasi *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* dan organisasi antarparlemen lainnya seperti IPU, AIPA, APA dan lainnya. Diskusi mendalam dengan parlemen negara lain yang memiliki fokus dan kebijakan spesifik terkait SDGs.

ISBN 978-602-74746-6-6



9 786027 474666

**Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan - Jakarta 10270

Tel: +6221 57158134 | Fax: +6221 5732132

Email: biro_ksap@dpr.go.id